Organisasi
Perburuhan
Internasional

DRAFT

Dinamika Pekerjaan, Pasar Tenaga Kerja serta Perekonomian di Nusa Tenggara Timur

Dinamika Pekerjaan, Pasar Tenaga Kerja serta Perekonomian di Nusa Tenggara Timur

DRAFT

Miranda Kwong
Per Ronnas

Daftar Isi

Pendahuluan: Analisa Diagnostik tentang Pekerjaan 5

1. Karakteristik Demografis 8
   1.1 Penduduk dan struktur usia 8
   1.2 Migrasi 10

2. Partisipasi tenaga kerja 11
   2.1 Karakteristik tenaga kerja 11
   2.2 Pengangguran 13

3. Kemiskinan 15

4. Pembangunan basis sumber daya manusia 18

5. Struktur Pekerjaan 22
   5.1 Berdasarkan industri utama 22
   5.2 Berdasarkan status pekerjaan yang utama 24

6. Informalitas 26

7. Kerangka Kerja Makroekonomi 28
   7.1 PDB provinsi berdasarkan sumber produksi 28
   7.2 PDB NTT berdasarkan jenis pengeluaran 33

8. Upah 35

9. Ringkasan dan implikasi kebijakan 39
   9.1 Ringkasan 39
   9.2 Formula untuk menciptakan pertumbuhan kaya lapangan kerja yang berkelanjutan 40
   9.3 Kesimpulan 42

REFERENSI 43

LAMPIRAN 44

A. Pendekatan Kegiatan Informal 44

B. Daftar tabel 45

Pendahuluan: Analisa Diagnostik tentang Pekerjaan

Penelitian ini menyajikan bagian pertama dari analisa diagnostik ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memahami kondisi alamiah mengapa tidak tersedia pekerjaan produktif yang cukup di NTT serta mengidentifikasi hambatan, tantangan serta peluang untuk meningkatkan pertumbuhan yang kaya lapangan pekerjaan, guna menyediakan basis pengetahuan yang tepat dalam menyusun kerangka kebijakan yang efektif, reformasi kelembagaan serta intervensi lain yang dimaksudkan untuk mengurangi defisiensi pekerjaan produktif. Analisa ini terdiri dari dua tahapan utama. ***Tahapan pertama*** terdiri dari analisa tentang kondisi awal dan pola kontemporer (pola perubahan saat ini) serta dinamika pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang ada. Tujuan dari bagian analisa ini adalah untuk membimbing analisa berikutnya – yaitu memahami *konteks perkembangan dan situasi lapangan pekerjaan di suatu negara.* Gambaran umum ini diharapkan dapat membantu identifikasi awal yang cukup komprehensif untuk menyusun hipotesa kekuatan serta kelemaham ekonomi dan pasar tenaga kerja yang ada serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan pertumbuhan yang kaya lapangan kerja dan berkelanjutan.

Sebagian besar bagian ini disusun sesuai formula berikut ini:

$$\frac{GDP_t}{Population_t} = \frac{WorkingAgePopulation_t}{Population} * \frac{LabourForce_t}{WorkingAgePopulation_t} * \frac{Employment_t}{LabourForce_t} * \frac{GDP_t}{Employment_t}$$

Atau $G_t = S_t * A_t * E_t * P_t$

Dengan kata lain, perubahan PDB per kapita adalah besar perubahan dalam hal:

Struktur usia, S_t
Tingkat kegiatan, A_t
Tingkat kerja, E_t
Produktivitas tenaga kerja, P_t

Tahapan penelitian ini terdiri dari tiga bidang dan persoalan utama: (i) demografi serta faktor-faktor terkait lainnya; (ii) pola umum serta dinamika pekerjaan, penghasilan, ketidak setaraan dan kemiskinan, serta (iii) pertumbuhan, pekerjaan dan dinamika produktivitas sector tertentu.

Bagian pertama, *struktur demografis dan dinamikanya (i)* disajikan pada bagian pertama formula ini yang mencakup beberapa parameter seperti tingkat pertumbuhan penduduk, fertilitas, struktur usia dan jenis kelamin serta perpindahan penduduk atau migrasi secara internal maupun eksternal. Bagian ini merupakan titik awal yang penting dalam analisa ini karena masalah sumber daya manusia dan perlunya menciptakan kondisi yang kondusif bagi tenaga kerja yang kreatif dan produktif merupakan hal yang sangat mendasar.

Bagian kedua, *pola umum dan dinamika pekerjaan, penghasilan, ketidaksetaraan dan kemiskinan (ii)* disajikan sebagai komponen kedua dan ketiga dari formula di atas.

Bagian ketiga adalah analisa tentang perkembangan *pertumbuhan , pekerjaan dan dinamika produktivitas sector tertentu (iii)* seperti terlihat dalam komponen terakhir dari formula di atas.

Ketiga komponen pertama dari formula ini memberi landasan untuk menyusun struktur pekerjaan utama serta dinamika pasar tenaga kerja. Hal ini diikuti dengan analisa struktur ekonomi serta kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan dengan produktivitas tenaga kerja, yang berhubungan dengan komponen akhir dari formula di atas. Aspek distribusi dari pertumbuhan ekonomi dan pasar tenaga kerja serta masalah ketidak setaraan dan kemiskinan juga dicakup dalam analisa ini.

Tahapan kedua dari analisa diagnostik ini disusun sesuai 'diagram pohon diagnostik pekerjaan' (lihat Lampiran).[1] Proses diagnostik ini mungkin terlihat seperti corong. Mulai dari serangkaian faktor yang seringkali saling terkait hingga proses eliminasi dan pelepasan hubungan sebab akibat yang mengharuskan penyempitan fokus dan identifikasi hambatan, tantangan serta peluang utama, untuk menciptakan pertumbuhan yang kaya lapangan pekerjaan.

Di saat penelitian ini beralih dari Tahapan Pertama ke Tahapan Kedua, modus pelaksanaanya berubah sesuai panduan pelaksanaan dari konstituen ILO sendiri dalam hal bagaimana analisa diagnostik pekerjaan dilakukan secara terstruktur, dan bertahap. Oleh karena itu, aktor utama dalam analisa fase kedua ini adalah para konstituen ILO dan pemangku kepentingan nasional di NTT sendiri, yang berdasarkan kerangka kerja lokakarya pelatihan akan menarik kesimpulan tentang beberapa aspek kualitatif dari analisa ini. Oleh karena itu, peran penulis utama berubah menjadi memfasilitasi dan membimbing analisa yang dilaksanakan para pemangku kepentingan nasional, yang juga bertanggung jawab untuk menarik kesimpulan utama. Dengan kata lain, bagian terakhir dari penelitian ini disusun oleh mereka yang akan bertanggung jawab langsung untuk menterjemahkan hasil temuan serta kesimpulan ke dalam bentuk kebijakan dan tindakan. Pada akhirnya, tujuan dari dari penelitian ini adalah bukan untuk menghasilkan penelitian lain, tapi untuk melaksanakan kegiatan bersama yang didasarkan pada pengetahuan bersama tentang hambatan, tantangan serta peluang nasional untuk meningkatkan pengembangan lapangan kerja yang luas. Studi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas konstituen ILO di bidang analisa pekerjaan, dan pada akhirnya termasuk peningkatan kapasitas dalam dialog sosial; sehingga tercapai pemahaman yang sama tentang tantangan utama lapangan pekerjaan berdasar analisa bersama.

Dinamika Pekerjaan, Pasar Tenaga kerja serta Perekonomian di Nusa Tenggara Timur

Tahapan pertama

Perekonomian Indonesia berjalan dengan baik selama beberapa tahun terakhir ini. Angka rata-rata pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah 5,2 persen pada periode tahun 2001-2008 dan 4,5 persen

1 Tahapan kedua belum dilaksanakan dan hasilnya belum dapat dilaporkan dalam naskah penelitian saat ini.

pada tahun 2009 walaupun terjadi krisis ekonomi.[2] Meskipun demikian, pertumbuhan negeri ini belum pulih ke level sebelum era krisis keuangan Asia tahun 1997. Kemiskinan tetap tinggi demikian pula halnya dengan disparitas (kesenjangan) antar daerah dan wilayah (perkotaan/pedesaan).

Secara nasional, pertumbuhan lapangan kerja menurun sejak terjadinya krisis dan belum mampu mengimbangi kecepatan pertumbuhan tenaga kerja.

Hal ini juga terjadi di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang merupakan salah satu dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dan sosial di NTT jauh tertinggal dari sebagian besar provinsi lain di Indonesia. Di NTT, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM[3] meningkat tajam dari level yang relatif rendah yaitu 60,3 persen di tahun 2002 menjadi 66,2 persen di tahun 2008. Namun NTT masih tetap di peringkat ketiga terendah dari semua provinsi di Indonesia dalam hal IPM karena secara nasional, IPM meningkat dari 65,8 persen menjadi 71,2 persen pada periode sama[4]. Berdasarkan beberapa indikator, perekonomian di provinsi inipun lebih lemah daripada pertumbuhan rata-rata nasional. Tingkat pertumbuhan produk domestik bruto per kapita (PDBR) antara tahun 2004-2008 hanya 2,8 persen, yang jauh di bawah angka rata-rata nasional sebesar 4,7 persen[5]. Tingkat bebas buta huruf dan pendaftaran sekolah lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, sedangkan angka kemiskinan lebih tinggi dari sebagian besar wilayah Indonesia yang lain.

Penelitian ini menawarkan analisa diagnostik lapangan kerja di Nusa Tenggara Timur. Tujuan utamanya adalah untuk memahami kurangnya pekerjaan produktif dan untuk mengidentifikasi hambatan utama terhadap pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini dibagi menjadi 9 bagian yang mencakup bagian pertama dari analisa diagnostik tentang pekerjaan. Bagian pertama **(1.)** terdiri dari gambaran tentang struktur demografis dan dinamikanya. Bagian kedua **(2.)** menerangkan tentang dinamika utama dan pola tenaga kerja, pekerjaan dan pengangguran yang diuraikan berdasarkan jenis kelamin dan lokasi (perkotaan/pedesaan). Bagian ini diikuti dengan analisa tentang tren kemiskinan dan pekerja miskin **(3.)**. Analisa tentang pengembangan basis sumber daya manusia disajikan pada bagian keempat **(4.)** Diikuti struktur pekerjaan berdasarkan industri utama, jenis kelamin dan wilayah serta status pekerjaan **(5.)**. Lalu, persoalan informalitas akan dicakup dalam bagian keenam **(6.)**. Bagian tentang kerangka kerja makro ekonomi ini menerangkan tentang mutu pertumbuhan yang ada: yang mencakup dinamika pekerjaan serta pertumbuhannya berdasarkan sektor, serta PDBR berdasarkan jenis pengeluaran **(7.)** diikuti dengan bagian ringkasan tentang upah pekerja **(8.)**. Bagian terakhir berisi ringkasan tentang hasil temuan, serta menjelaskan kekuatan dan tantangan yang dihadapi NTT dalam hal pekerjaan produktif serta beberapa kesimpulan akhir **(9.)**

2 ADB, ILO & IDB, 2010.

3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari tiga dimensi pembangunan manusia, yaitu tingkat harapan hidup saat kelahiran, indeks endidikan termasuk melek huruf di kalangan dewasa dan tingkat pendaftaran sekolah secara umum, serta PDB per kapita.

4 BPS, http://dds.bps.go.id/eng/aboutus.php?tabel=1&id_subyek=26

5 BPS, 2009e.

1. Karakteristik Demografis

Luas provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah 47 350 km2 yang mencakup lebih dari 566 pulau, dimana 42 pulau di antaranya tidak berpenghuni. Sebagian besar wilayah NTT adalah pegunungan dan perbukitan dengan sedikit lahan datar. NTT adalah wilayah kering yang sebagian besar wilayahnya kurang subur dan umumnya kurang memiliki sumber daya alam dan jarang berpenghuni. Curah hujan di provinsi ini sedikit dan wilayahnya banyak didominasi padang rumput. Oleh karena itu, provinsi ini sangat cocok untuk peternakan dan perkebunan lahan kering. Pada tahun 2008, provinsi ini dimekarkan menjadi 19 kabupaten dan 1 kotamadya, 284 kecamatan dan 2 837 desa dengan ibukota Kupang. Agama yang dianut masyarakat setempat tidak sama seperti provinsi lain di Indonesia, dimana 91 persen penduduknya menganut agama Kristen (mayoritas Katolik, tapi ada banyak yang menganut agama Protestan), 8 persen beragama Islam, 0,6 persen menganut agama Hindu atau Budha, dan 0,4 persen menganut aliran kepercayaan tradisional.

1.1 Penduduk dan struktur usia

Berdasarkan Sensus Penduduk yang diadakan tahun 2010, jumlah penduduk NTT tercatat sebanyak 4 679 316, atau hanya 2 persen dari jumlah penduduk Indonesia (**Tabel 1.1**). Penyebaran penduduk berdasarkan jenis kelaminnya adalah berimbang yaitu 49,7 persen perempuan dan 50,3 persen laki-laki.

Dengan tingkat pertumbuhan penduduk tahunan sekitar 2 persen dari tahun 2000 sampai 2010, NTT berkembang lebih cepat dari periode sebelumnya (1990-2000). Namun tingkat pertumbuhan tercepat tercatat pada periode 2000-2005 yaitu sebesar 2,11 persen, kemudian sedikit menurun di bawah angka 2 persen (**Tabel 1.2**).[6] Walaupun pertumbuhan penduduk secara nasional menurun sejak tahun 1990 namun tidak demikian halnya di NTT. Pada tahun 2007, Total Fertilitas di NTT diperkirakan yang tertinggi dari semua provinsi yaitu sebesar 2,9 dibandingkan 2,2 secara nasional[7]. Tingkat reproduksi bersih NTT adalah sebesar 1,4 yaitu 100 orang ibu digantikan oleh 140 orang anak perempuan.[8]

6 Pertumbuhan penduduk yang tinggi pada periode ini mungkin sebagian dikarenakan masuknya pengungi dari Timor Leste.

7 BPS, 2009d.

8 Ibid

Tabel 1.1: Penduduk (000) dan prosentase distribusi penduduk, 2000-2010

	2000	2005	2010
NTT			
Penduduk	3,823	4,243.20	4,679.30
Prosentase total	1.8	1.9	2
Indonesia			
Penduduk	205,132	218,869.0	237,556.4

Sumber: BPS (2010, 2007b.)

Tabel 1.2: Tingkat pertumbuhan penduduk tahunan, 2000-2010

	1990-2000	2000-2010*	2000-2005	2005-2010*
NTT	1.64	2.04	2.11	1.98
Indonesia	1.49	1.48	1.30	1.65

Sumber: BPS (2010, 2007b.), perkiraan penulis sendiri

Remaja merupakan bagian yang signifikan dari total penduduk NTT (**Gambar 1**). Dengan sepertiga penduduk berusia 0-14 tahun, tenaga kerjanya diperkirakan akan terus meningkat tinggi selama beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu, NTT akan terus menghadapi tantangan besar dalam menciptakan peluang pekerjaan produktif guna memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya yang semakin meningkat selama beberapa tahun mendatang.

Dua pertiga penduduknya adalah penduduk usia kerja yaitu di atas 15 tahun, dimana sebagian besarnya berusia antara 15 sampai 49 tahun. Prosentase penduduk yang berusia tua tetap kecil.

Struktur usianya sangat baik. Dimana sebagian besar penduduknya merupakan kelompok usia yang aktif secara ekonomi, sehingga rasio ketergantungan menurut usia sangat rendah. Dikarenakan fertilitas mulai menurun, prosentase anak akan menurun, sehingga angka beban tanggungan akan meningkat.

NTT tampaknya berada pada tahap awal 'jendela kesempatan demografi' dimana tingkat kelahiran dan fertilitas dikombinasikan dengan penduduk muda sehingga menurunkan rasio ketergantungan karena tingkat pertumbuhan penduduk usia kerja tetap tinggi selama satu atau dua dekade mendatang. Dampaknya dua kali lipat: pertama, turunnya rasio ketergantungan mengakibatkan pendapatan per kapita yang lebih tinggi bila ada pertumbuhan yang memadai untuk menghasilkan pekerjaan produktif karena meningkat pesatnya jumlah tenaga kerja yang ada. Kedua, rasio ketergantungan (angka beban tanggungan) yang lebih besar akan meningkatkan kapasitas nasional dalam menghemat dan berinvestasi, sehingga menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi, penciptaan lapangan pekerjaan serta penghasilan tenaga kerja yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, jika perekonomian mampu menciptakan lapangan pekerjaan produktif bagi banyaknya tenaga kerja baru setiap tahunnya tanpa memandang produktivitas tenaga kerja, maka pendapatan per kapita secara otomatis akan meningkat.

Gambar 1 Piramida Penduduk, 2008

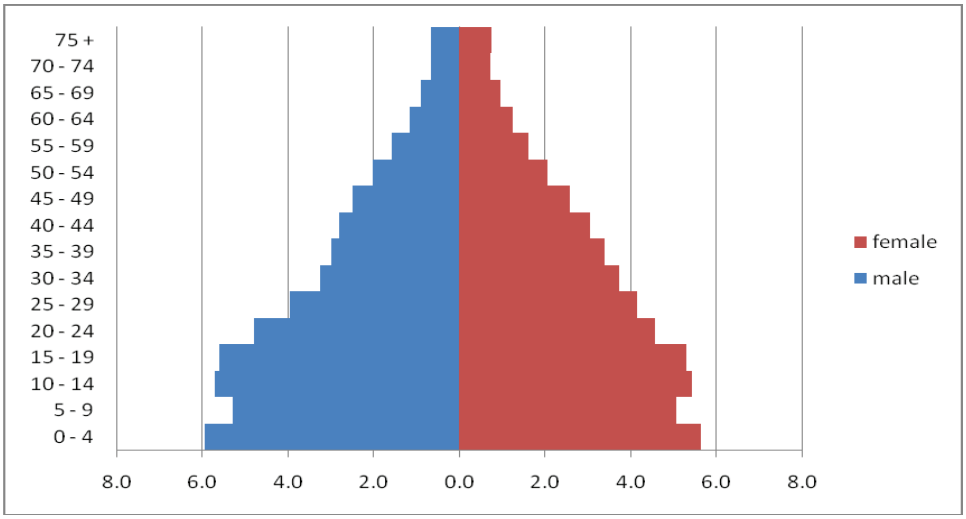

Sumber: BPS, 2009c.

2.2 Migrasi

Dampak perpindahan penduduk atau migrasi terhadap suatu Negara adalah sangat kompleks terutama di tingkat provinsi. Di satu sisi, migrasi menghabiskan basis sumber daya manusia lokal; sementara di sisi lain, remitansi yang dikirim TKI ke keluarga mereka di kampung sangat membantu perekonomian negeri ini. Meskipun demikian, migrasi tidak menyediakan dasar yang efektif untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga pasar tenaga kerja lokal perlu dibuat menarik, dan lebih banyak pekerjaan di daerah yang perlu diciptakan.

Di Nusa Tenggara Timur, data statistik resmi menunjukkan bahwa migrasi ke luar negeri tidak sepenting yang diperkirakan. Pada tahun 2008, sekitar 8 196 TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang berasal dari NTT pergi bekerja di luar negeri, terutama Malaysia.[9] Negara tujuan lain antara lain adalah Singapura, Hong Kong, Brunei dan Taiwan. Jumlah yang tercatat pada tahun sebelumnya menunjukkan angka yang lebih besar yaitu 9 655 TKI. Sebagian besar TKI dari NTT tampak memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Sebagai contoh, Malaysia adalah Negara tujuan utama TKI yang memiliki latar belakang pendidikan relatif rendah, dimana sebagian besar dari mereka hanya lulusan SMP.

9 Berdasarkan angka statistik resmi. Namun tidak tertutup kemungkinan adanya migrasi yang tidak terdaftar (TKI Ilegal)

2. Partisipasi tenaga kerja

Gambaran tentang dinamika dan pola utama tenaga kerja dan lapangan pekerjaan – berdasarkan tingkat kegiatan dan lapangan kerja – yang diuraikan sesuai jender dan lokasi (perkotaan/pedesaan), dapat memberi kita pemahaman awal tentang situasi tenaga kerja yang ada.

$$\frac{GDP_t}{Population_t} = \frac{WorkingAgePopulation_t}{Population} * \frac{LabourForce_t}{WorkingAgePopulation_t} * \frac{Employment_t}{LabourForce_t} * \frac{GDP_t}{Employment_t}$$

2.1. Karakteristik tenaga kerja

Jumlah penduduk usia kerja bertambah lebih cepat dari jumlah tenaga kerja antara tahun 2002 sampai 2008. Oleh karena itu, tingkat kegiatan di NTT mengalami penurunan dari waktu ke waktu yaitu dari 78,5 persen di tahun 2002 menjadi 71,2 persen pada tahun 2008 **(Tabel 2.1)**. Penurunan ini diakibatkan oleh meningkatnya jumlah remaja yang melanjutkan pendidikan mereka. **Gambar 2** memperlihatkan bahwa penurunan tingkat kegiatan ini sebagian besar diakibatkan oleh penurunan tingkat kegiatan kelompok usia remaja. Antara tahun 2002 sampai 2008, terjadi penurunan sebesar 12 persen dalam hal tingkat kegiatan pada kelompok usia 15-24 tahun. Meskipun demikian, penurunan tingkat kegiatan juga terjadi pada kelompok usia 25-49 tahun, sementara bagi kelompok usia yang lebih dewasa tetap stabil.

Penurunan tingkat kegiatan terbesar terjadi di pedesaan, yaitu dari 81,8 persen tahun 2002 menjadi 74,5 persen tahun 2008 (**Tabel 2.1**). Akibat dari penurunan ini, rasio ketergantungan aktual tidak menurun seperti yang diperkirakan, namun mungkin akan menurun pada beberapa tahun mendatang. Pada tahun 2008, ada 0,55 tanggungan untuk setiap orang yang masuk dalam kelompok usia kerja.

Bila data ini dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, maka akan muncul gambaran yang sangat berbeda. Tingkat kegiatan kalangan perempuan adalah 20 persen lebih rendah dari laki-laki dan ini menunjukkan adanya kecenderungan yang sama untuk laki-laki setelah tahun 2005; yaitu turun dari 68 persen tahun 2002 menjadi 60 persen pada tahun 2008. Sementara tingkat kegiatan di kalangan perempuan sangat jauh lebih rendah dari laki-laki di berbagai kelompok usia. Perbedaan ini sangat besar - yaitu 28 persen di penduduk usia 25-49 tahun - dan tetap tinggi di kelompok usia yang lebih dewasa. ***Tingkat kegiatan perempuan yang rendah secara komparatif ini merupakan hal penting yang perlu diberi perhatian khusus dan diteliti lebih lanjut.***

Dilihat dari tingkat lapangan pekerjaan dari waktu ke waktu, tampaknya ia bergerak sesuai tingkat kegiatan. Kesenjangan antara tingkat kegiatan dengan tingkat lapangan pekerjaan sangat kecil, hal ini mencerminkan relatif rendahnya tingkat pengangguran secara keseluruhan.

Dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhanm dapat dilihat bahwa baik tingkat kegiatan maupun pekerjaan di NTT secara konsisten lebih tinggi, sementara tingkat pengangguran di tingkat nasional dua kali lebih tinggi dari tingkat pengangguran di NTT. Pada tingkatan yang lebih luas, gambaran yang lebih baik di NTT dari gambaran secara nasional ini kemungkinan besar diakibatkan oleh kuatnya ekonomi pertanian dan pasar tenaga kerja di NTT dimana masyarakat tidak mampu untuk terus tidak bekerja dan pada akhirnya banyak terlibat dalam kegiatan di sektor informal (**Tabel 2.1**).

Tabel 2.1: Karakteristik tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin di NTT, 2002-2008

	Laki-laki		Perkotaan	
	2002	**2008**	**2002**	**2008**
Tingkat kegiatan (%)	89.5	83.1	61.4	55.7
Tingkat penduduk bekerja (%)	86.1	81.0	50.5	50.3
	Perempuan		**Pedesaan**	
	2002	**2008**	**2002**	**2008**
Tingkat kegiatan (%)	68	59.7	81.8	74.5
Tingkat penduduk bekerja (%)	64.6	56.4	79.9	75.4
	Total NTT		**Total Indonesia**	
	2002	**2008**	**2002**	**2008**
Rasio ketergantungan, aktual	1.1	1.1		
Rasio ketergantungan, berbasis usia	0.6	0.5		
Tingkat kegiatan (%)	78.5	71.2	67.8	67.2
Tingkat penduduk bekerja (%)	75.1	68.7	61.6	61.5
Tingkat pengangguran (%)	4.3	3.7	9.1	8.4

Rasio ketergantungan aktual: jumlah penduduk yang tidak bekerja dibagi jumlah penduduk yang bekerja 15+
Rasio ketergantungan, berbasis usia: jumlah penduduk non-usia kerja (di bawah 15) dibagi jumlah penduduk usia kerja 15+
Tingkat kegiatan: jumlah tenaga kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja 15+ * 100
Tingkat penduduk bekerja: jumlah pekerja dibagi jumlah penduduk usia kerja 15+ * 100
Tingkat pengangguran: jumlah pengangguran dibagi jumlah pekerja * 100
Sumber: BPS (2008a., 2002)

Gambar 2

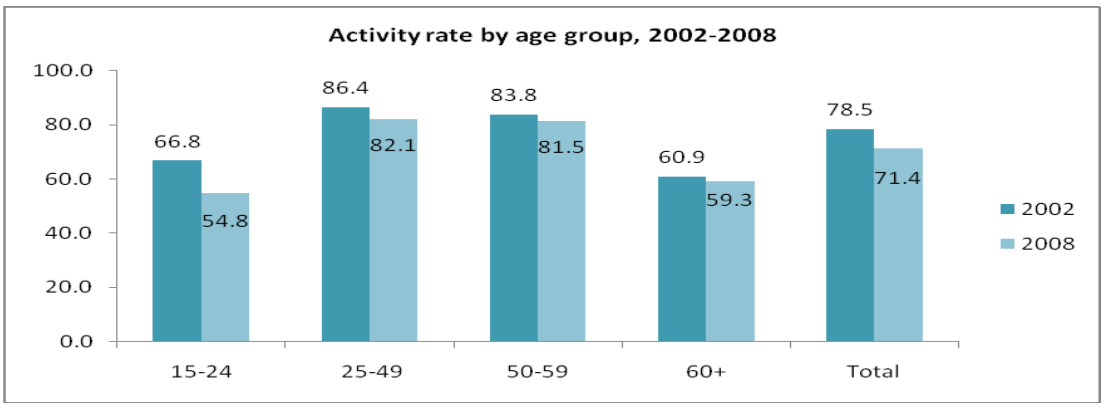

Sumber: BPS (2008a., 2002)

Gambar 3

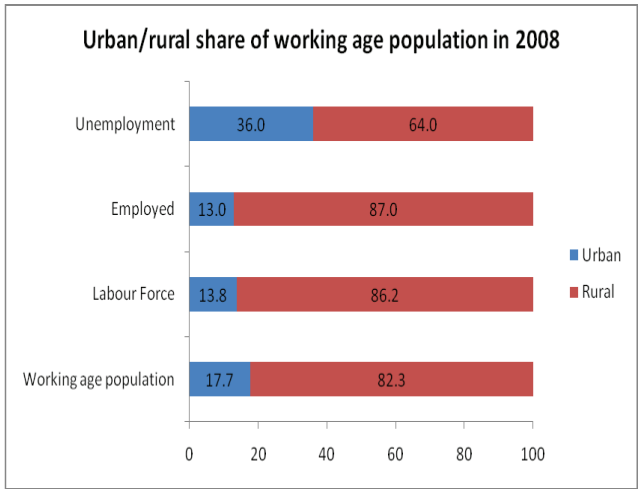

Sumber: BPS 2008a.

Provinsi NTT memiliki karakteristik luasnya sektor pedesaan dimana kegiatan utamanya terkonsentrasi disana. Pada tahun 2008, 82,3 persen jumlah penduduk usia kerja tinggal di desa dimana sebagian besar penduduk juga bekerja di sana (**Gambar 3**).

Oleh karena itu, dilihat dari tingkat kegiatan dan pekerjaan dari waktu ke waktu, tingkat kegiatan di desa lebih tinggi daripada di kota walaupun kecenderungan itu menurun selama beberapa tahun terakhir (**tabel 2.1**). Sementara tingkat kegiatan di kota di NTT lebih rendah.

2.2. Pengangguran

Tingkat pengangguran di NTT sedikit menurun dari waktu ke waktu, yaitu dari 4,3 persen di tahun 2002 menjadi 3,7 persen di tahun 2008 (**Tabel 2.3).** Tingkat pengangguran relatif rendah, terutama bila dibandingkan angka nasional (8,4 di tahun 2008), namun tenaga kerjanya tidak tersebar merata. Secara umum, tingkat pengangguran memberi dampak yang lebih besar terhadap perempuan daripada laki-laki, jumlah tenaga kerja di kota jauh lebih besar dari desa, terutama tenaga kerja kaum muda (**Tabel 2.2**). Kaum muda di kota mencapai angka 23 persen di tahun 2010, ini menunjukkan bahwa kaum muda di kota masih sulit masuk ke pasar tenaga kerja, walaupun situasinya agak lebih baik secara nasional. Secara umum, tingkat pengangguran yang rendah di desa kemungkinan besar dikarenakan oleh dominasi pertanian dan perkebunan serta sektor informal.

Tabel 2.2: Tingkat pengangguran berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin dan pedesaan/perkotaan di NTT dan Indonesia, 2008

NTT					
Usia	***15-24***	***25-49***	***50-59***	***60+***	***Total***
Perempuan	12.8	4.3	0.9	0.3	5.5
Laki-laki	6.0	1.8	0.2	0.0	2.4
Total	**8.8**	**2.9**	**0.5**	**0.1**	**3.7**
Pedesaan	6.7	2.1	0.4	0.1	2.8
Perkotaan	22.9	7.1	1.2	0.0	9.7
INDONESIA					
Usia	***15-24***	***25-49***	***50-59***	***60+***	***Total***
Perempuan	25.5	7.0	1.6	1.5	9.7
Laki-laki	21.8	5.3	1.7	0.7	7.6
Total	**23.3**	**6.0**	**1.7**	**1.0**	**8.4**
Pedesaan	20.2	4.3	1.2	1.0	6.5
Perkotaan	27.1	8.1	2.4	1.1	10.9

Sumber: BPS, 2008a.

Analisa yang lebih terperinci tentang pengangguran menunjukkan bahwa sekitar dua pertiga di antara para penganggur sedang berusaha mencari pekerjaan secara aktif, sementara 28 persen sisanya tidak. Mereka ingin bekerja tapi tidak secara aktif mencari pekerjaan (**Tabel 2.3**). Jika dibandingkan dengan situasi yang ada di tahun 2002, maka kita dapat melihat perkembangan positif dimana angka pengangguran yang tidak aktif mencari pekerjaan telah mengalami penurunan. Sebagian besar dari mereka dijumpai di pedesaan, dimana peluang pekerjaan sangat kecil. Sementara di daerah perkotaan, empat dari lima pengangguran aktif mencari pekerjaan. Sebagian kecil penganggur sedang berusaha

mendirikan usaha (2,6 persen), sementara 2,9 persen yang lain telah mendapatkan pekerjaan atau akan mulai bekerja.

Secara ringkas, tingkat kegiatan yang menurun dan tingkat kegiatan perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki serta rendahnya produktivitas dan pendapatan dari pekerjaan mungkin merupakan masalah utama di NTT. Dengan mengecualikan pentingnya kaum muda, terutama perempuan, tenaga kerja di perkotaan, pengangguran terbuka bukanlah masalah utama. Hal ini memberikan arahan agar analisa berikutnya dilakukan terhadap mereka yang bekerja, terutama pada pekerja miskin dan mereka yang bekerja namun dengan upah yang tidak memadai.

Tabel 2.3 Pengangguran berdasarkan asal muasalnya (%), 2002 & 2008

	Mencari pekerjaan	Mendirikan usaha/perusahaan baru	Tidak diperbolehkan	Sudah mendapat pekerjaan	Total	Indonesia
			2002			
Perempuan	53.9	1.1	44.9	0	100	5
Laki-laki	52.8	2.2	43.8	1.2	100	3.8
Total	**53.4**	**1.7**	**44.4**	**0.6**	**100**	**4.3**
Pedesaan	37	1.2	60.5	1.2	100	2.4
Perkotaan	68	2.1	29.9	0	100	17.7
			2008			
Perempuan	68.5	2	26.7	2.9	100	5.5
Laki-laki	64.6	3.7	28.9	2.8	100	2.4
Total	**67.0**	**2.6**	**27.5**	**2.9**	**100**	**3.7**
Pedesaan	59.5	3	34.1	3.4	100	2.8
Perkotaan	80.4	1.9	15.8	1.9	100	9.7

3. Kemiskinan

Kemiskinan tetap menjadi masalah besar di NTT, walaupun semua indikator kemiskinan telah mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir ini. Jumlah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan telah banyak mengalami penurunan berdasarkan angka absolut maupun prosentasenya terhadap jumlah penduduk, sementara tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan (**Tabel 3.1**). Namun, kemiskinan masih tetap tersebar luas di NTT. Tingkat kemiskinan masyarakat adalah sebesar 23,3 persen tahun 2009, turun dari 27,5 persen yang tercatat dua tahun sebelumnya. Walaupun kemiskinan di NTT telah menurun lebih cepat dari angka nasional selama dua tahun terakhir ini, namun kemiskinan di NTT masih tetap sepuluh persen lebih tinggi dari angka nasional secara keseluruhan.

Kemiskinan adalah fenomena besar di pedesaan NTT dimana hampir 90 persen dari masyarakat miskin tinggal di pedesaan. Insiden kemiskinan adalah jauh lebih tinggi di desa daripada di kota; yaitu 25,4 dibanding 14,0 persen pada tahun 2009. Bila dibandingkan dengan angka nasional secara keseluruhan, kemiskinan di desa mungkin jauh lebih terlihat di NTT bila dibandingkan angka nasional secara keseluruhan. Tingkat urbanisasi yang rendah dan diversifikasi ekonomi menunjukkan banyaknya perbedaan dalam hal tingkat kemiskinan antara NTT dengan angka nasional. Dengan akses ke kota dan peluang pekerjaan non-pertanian (pra panen dan pasca panen) yang lebih besar, tekanan terhadap sektor pertanian dan perkebunan untuk membantu penduduk akan mengalami penurunan.

Tabel 3.1 Kemiskinan berdasarkan daerah perkotaan dan pedesaan tahun 2007 & 2009

NTT								
	Penyebaran penduduk miskin		***% penduduk miskin***		***Indeks kesenjangan kemiskinan***		***Indeks besarnya kemiskinan***	
	2007	**2009**	**2007**	**2009**	**2007**	**2009**	**2007**	**2009**
Pedesaan	89.3	89.2	30.0	25.4	5.08	4.47	1.35	1.24
Perkotaan	10.7	10.8	16.4	14	3.89	2.63	1.29	0.69
Total	100.0	100.0	27.5	23.3	4.87	4.14	1.34	1.14
Total (000)	*1,163.6*	*1,013*						
Indonesia								
	Penyebaran penduduk miskin		***% penduduk miskin***		***Indeks kesenjangan kemiskinan***		***Indeks besarnya kemiskinan***	
	2007	**2009**	**2007**	**2009**	**2007**	**2009**	**2007**	**2009**
Pedesaan	63.5	63.4	20.4	17.4	3.78	3.05	1.09	0.82
Perkotaan	36.5	36.6	12.5	10.7	2.15	1.91	0.57	0.52
Total	100	100	16.6	14.2	2.99	2.5	0.84	0.68
Total (000)	*37,168.3*	*32,530.0*						

Sumber: situs web BPS, http://dds.bps.go.id/eng/index.php bagian kemiskinan

Paparan terhadap kemiskinan bervariasi sesuai tingkat pendidikan. Masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi kurang terkena imbas kemiskinan. Pada tahun 2007, lebih dari 80 persen dari jumlah penduduk miskin adalah dari kalangan keluarga yang kepala keluarganya hanya lulusan SD.[10]

Angka statistik tahun 2007 tentang anak-anak yang putus sekolah menunjukkan bahwa lebih banyak murid dari kalangan keluarga miskin yang putus sekolah daripada murid dari keluarga non miskin. Kecenderungan ini bahkan lebih jelas terlihat pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Tingkat putus sekolah SD adalah sebesar 2,2 persen di kalangan penduduk miskin dibandingkan 1,1 persen bagi kalangan non miskin tahun 2007. Sementara, tingkat putus sekolah SMP adalah sebesar 19,1 persen di kalangan penduduk miskin dibandingkan 8,9 persen yang tercatat di kalangan non miskin).[11] Angka putus sekolah yang tinggi di kalangan murid yang berasal dari keluarga miskin merupakan masalah besar karena kemiskinan akan terjadi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Masalah pekerjaan di NTT, serta relatif redahnya tingkat pengangguran, namun dengan tingkat kemiskinan yang tinggi membutuhkan adanya perhatian khusus terhadap pekerja miskin.

Seperti yang terlihat dalam **Tabel 3.2**, 1 dari 4 orang hidup dalam kemiskinan tahun 2008, ini berarti bahwa sekitar 556'900 penduduk bekerja namun tidak memperoleh penghasilan yang cukup untuk mengangkat diri mereka dan keluarga mereka keluar dari kemiskinan, karena mereka termasuk dalam kategori pekerja miskin. Lebih dari 90 persen pekerja miskin di NTT, dimana sekitar setengah juta penduduk dijumpai di daerah pedesaan. Dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang lebih baik bagi pekerja dan buruh pertanian serta perluasan peluang pekerjaan secara cepat di luar pertanian harus dijadikan komponen penting dalam strategi yang dimaksudkan untuk menciptakan pekerjaan produktif serta pekerjaan layak untuk semua orang.

Tabel 3.2: Pekerjaan produktif yang diperoleh dan dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan tahun 2013 (dalam 1,000)

	2002	2008	2013 (Skenario 1)	2013 (Skenario 2)
Jumlah penduduk	3945	4,534.30		
Penduduk usia 15+	2468.7	3,036.0	3,221.8	3,221.8
Angkatan kerja	1937	2,166.8	2,343.9	2,343.9
% tingkat kemiskinan	30.7	25.7	0.0	25.7
Pekerja miskin	594.7	556.9	0.0	602.4
Tenaga kerja produktif	1342.3	1,609.9	2,343.90	1741.5

	2002-2008		2008-2013 (Skenario 1)		2008-2013 (Skenario 2)	
	Total Perubahan	Perubahan tahunan	Total perubahan	Perubahan tahunan	Total Perubahan	Perubahan tahunan
Jumlah penduduk	589.3	98.2				
Penduduk usia 15+	567.3	94.6	185.8	37.2	185.8	37.2
Angkatan kerja	229.8	38.3	177.1	35.4	177.1	35.4
Pekerja miskin	-37.8	-6.3	-556.9	-111.4	45.5	9.1
Tenaga kerja produktif	267.6	44.6	734.0	146.8	131.6	26.3

Sumber: BPS (2009c., 2002), angka perkiraan penulis untuk data tahun 2013

Keterangan:

Angka-angka untuk tahun 2013 (penduduk usia 15+ tahun dan angkatan kerja) diperoleh berdasarkan populasi penduduk menurut kelompok usia tahun 2008 dengan asumsi angkatan kerja dan tingkat kemiskinan tetap sama seperti di tahun 2008.

Tingkat kemiskinan untuk tahun 2002 dan 2008 diperoleh dari data BPS.

Tingkat kemiskinan untuk tahun 2013 bervariasi sesuai dua skenario yang ada. Skenario pertama berasumsi bahwa kemiskinan sudah benar-benar dihapus sementara skenario kedua berasumsi bahwa kemiskinan tetap sama seperti di tahun 2008.

Pekerja miskin adalah tenaga kerja yang tidak memperoleh upah yang cukup untuk membawa diri mereka dan tanggungan mereka keluar dari kemiskinan. Pekerja miskin mencakup masyarakat miskin yang tidak bekerja. Kalkulasinya adalah sebagai berikut: jumlah tenaga kerja x jumlah masyarakat miskin.

Bekerja secara produktif adalah teanga kerja yang bukan pekerja miskin. Mereka mencakup pengangguran yang tidak miskin.

10 BPS, 2009d.

11. Ibid

Tabel 3.2 memperlihatkan perkembangan pekerjaan produktif dan pekerja miskin pada periode 2002-2008 dan angka ini bila dibandingkan perkembangan kenaikan pekerjaan produktif yang dibutuhkan untuk mencapati target pengurangan kemiskinan. Pada skenario pertama, implikasi target yang ambisius untuk menghapus kemiskinan upah pada tahun 2013 diperlihatkan. Pada skenario kedua, tingkat kemiskinan diperkirakan akan tetap sama antara tahun 2008 sampai 2013. Sementara target aktual yang ditetapkan untuk mengurangi kemiskinan adalah suatu keputusan politis, dimana angkanya harus di antara kedua skenario tersebut.

Antara tahun 2002 sampai 2008, jumlah tenaga kerja meningkat sekitar 230 ribu. Pada periode yang sama, dapat diperkirakan bahwa pekerjaan produktif meningkat sebesar 289 ribu, sehingga jumlah pekerja miskin menurun sebesar kurang lebih 40 000 orang. Pada periode 2008-2013, diperkirakan bhawa tingkat pertumbuhan tenaga kerja berkisar antara 35 sampai 38 ribu per tahun. Oleh karena itu, tekanan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru akan sedikit berkurang.

Berdasarkan skenario yang sangat ambisius untuk menghapus kemiskinan pada tahun 2013, jumlah pekerja miskin perlu dikurangi hingga nol, yaitu sebesar lebih dari setengah juta orang, dan sekitar 177 ribu pekerjaan produktif baru perlu diciptakan. Oleh karena itu, jumlah pekerjaan produktif perlu ditingkatkan sebanyak 734 ribu melalui penciptaan lapangan kerja baru serta meningkatkan pekerjaan dengan tingkat produktivitas rendah dan upah rendah yang ada saat ini. Dengan kata lain, tingakt penciptaan lapangan kerja produktif perlu ditingkatkan dari 44 600 per tahun antara tahun 2002-2008 menjadi 146.800 per tahun antara tahun 2008-2013.

Sebagai perbandingan, menurut skenario yang kurang ambisius dimana tingkat kemiskinan tidak berubah, hanya 26 300 pekerjaan produktif yang perlu diciptakan. Di samping itu, jumlah pekerja miskin akan meningkatkan sekitar 9,000 per tahun.

Dikarenakan ambisi politis kemungkinan besar lebih mendukung skenario pertama daripada kedua, maka tingkat penciptaan lapangan kerja produktif perlu banyak ditingkatkan. Perlu dicatat bahwa ada dua faktor demografis yang akan menfasilitasi pencapaian ambisi ini. Pertama, peningkatan akan terjadi karena adanya pengurangan tingkat ketergantungan berbasis umur pada beberapa tahun mendatang, yang akan mengurangi penghasilan yang dibutuhkan setiap pekerja agar dapat membawa mereka dan anggota keluarga yang ditanggungnya keluar dari kemiskinan, dengan asumsi bahwa tingkat kegiatan tidak menurun lebih jauh. Kedua, melambatnya tingkat pertumbuhan tenaga kerja akan mengurangi tekanan terhadap ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja baru serta memungkinkan adanya peralihan secara bertahap dari fokus menciptakan lapangan kerja baru menjadi peningkatan produktivitas dan penghasilan bagi mereka yang sudah bekerja.

Temuan penting:

Di NTT, tingkat kelahiran dan fertilitas menurun secara bertahap dan tingkat pertumbuhan penduduk mengalami penurunan. Prosentase penduduk usia kerja masih tinggi dan akan terus tinggi selama sepuluh tahun mendatang. Kombinasi faktor-faktor ini akan meningkatkan rasio ketergantungan berbasis umur di masa mendatang di NTT.

Tingkat kegiatan di NTT telah mengalami penurunan selama lima tahun belakangan ini. Tingkat kegiatan ini sangat bervariasi antar jenis kelamin. Tingkat kegiatan perempuan berada jauh di bawah laki-laki, yaitu sekitar 20%. Alasan di balik hal ini masih tidak jelas dan untuk itu dibutuhkan adanya perhatian yang lebih besar.

Kemiskinan tetap menyebar luas di NTT, namun situasi ini telah membaik pada beberapa tahun belakangan ini. Tingkat kemiskinan penduduk telah mengalami penurunan sebesar 4 persen selama dua tahun belakangan, dan tingkat keparahan kemiskinan sudah berkurang. Dikarenakan banyaknya jumlah tenaga kerja, termasuk pekerja miskin, yang bekerja di lahan pertanian sendiri, maka dapat diasumsikan bahwa tingkat produktivitas di sektor ini mungkin sudah meningkat atau minimal tetap stabil. Tingkat kemiskinan yang rendah di daerah perkotaan menunjukkan bahwa hanya ada sedikit perpindahan penduduk dari desa ke kota.

4. Pembangunan basis sumber daya manusia

Walaupun buta huruf di kalangan penduduk usia 15+ tahun telah berkurang dari waktu ke waktu yaitu dari 15,1 persen tahun 2003 menjadi 12,0 persen tahun 2009 di provinsi ini, namun kesenjangan antara NTT dengan Indonesia secara keseluruhan masih tetap selisih 5 persen dimana angka nasional masih lebih tinggi.[12]

Pada tahun 2008, Rasio Partisipasi Sekolah atau *Net Enrolment Ratio* (NER)[12] melebihi angka 90 persen untuk pendidikan dasar (biasanya dari usia 6 sampai 12), yaitu sedikit di bawah angka rata-rata nasional **(Tabel 4.1)**. Meskipun demikian, angka partisipasi sekolah turun tajam setelah SD sementara latar belakang pendidikan kaum muda di NTT tetap jauh lebih rendah daripada angka nasional secara keseluruhan. Kurang dari separoh murid di NTT langsung masuk dari SD ke SMP (biasanya mereka yang berusia 12-15), dibandingkan dua pertiga murid secara nasional. Kesenjangan pendidikan ini juga dijumpai pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hanya sepertiga dari kelompok usia terkait melanjutkan studi mereka ke jenjang SMA di NTT (biasanya usia 15 sampai 18), dibandingkan 44 persen secara nasional.

Kesimpulan utamanya adalah bahwa walaupun melanjutkan studi ke tingkat pendidikan menengah telah mejadi suatu keharusan di sebagian besar wilayah Indonesia; namun hal ini tidak terjadi di NTT, dimana separoh murid putus sekolah setelah pendidikan dasar.[14] Latar belakang pendidikan penduduk di NTT memang sangat rendah dimana dua pertiga penduduk yang berusia di atas 10 tahun tidak lulus SD pada tahun 2008.[15]

Tingkat partisipasi sekolah bruto (GER)[16] adalah jauh lebih tinggi dari tingkat pendaftaran bersih di semua tingkat pendidikan. Ada beberapa alasan di balik perbedaan ini. Di satu sisi, hal ini mungkin dikarenakan oleh tingkat repetisi pendidikan yang tinggi, dimana murid lebih banyak tinggal di sekolah dari yang diharapkan dan ini menunjukkan adanya inefisiensi dan mutu pendidikan yang rendah. Meskipun demikian, hal ini mungkin juga diakibatkan oleh meningkatkan kemungkinan orang dewasa kembali mengenyam pendidikan yang mereka tinggalkan sewaktu muda. Data dan analisa yang lebih terperinci diperlukan untuk menentukan faktor penyebab terjadinya perbedaan antara NER dengan GER.

12 http://dds.bps.go.id/eng/aboutus.php?about=0, bagian pendidikan

13 NER adalah jumlah murid dalam kelompok usia teoritis yang mendaftar ke sekolah dalam prosentase penduduk yang sama.

14 Walaupun sebagian di antara mereka akhirnya kembali melanjutkan pendidikan mereka.

15 BPS, 2009c.

16 GER adalah jumlah murid yang mendaftar diri pada tingkat pendidikan tertentu tanpa memandang usia mereka dan ditampilkan dalam prosentase penduduk dan kelompok usia teoritis untuk tingkat pendidikan tersebut.

Tabel 4.1: Rasio Tingkat Partisipasi Sekolah Bruto (GER) dan Tingkat Partisipasi Sekolah Bersih (NER) tahun 2008 - %

	SD	SMP	SMA
NTT			
GER	108.4	62.5	51.9
NER	91.7	49.6	33.5
Indonesia			
GER	109.4	81.1	57.5
NER	94.0	66.8	44.2

Sumber: http://dds.bps.go.id/eng/aboutus.php?about=0, bagian pendidikan

Tingkat pendidikan tenaga kerja di NTT telah meningkat selama satu decade terakhir (Tabel 4.2). di tahun yang sama (2009) dua pertiga tenaga kerja di NTT – 65 persen dari laki-laki dan 70 persen dari perempuan – mengenyam pendidikan tidak lebih dari SD, bila dibandingkan separoh dari tenaga kerja secara nasional. Di sisi lain, kurang dari 5 persen tenaga kerja di NTT memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Angka ini adalah 3 persen lebih tinggi secara nasional. Dilihat dari tingkat pendidikan tenaga kerja selama beberapa tahun, kita dapat melihat adanya dua kecenderungan yang bertolak belakang. Di satu sisi, jumlah tenaga kerja yang tidak lulus SD adalah lebih tinggi di tahun 2009 daripada tahun 2002. Di sisi lain, jumlah tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan menengah atau lebih tinggi meningkat antara tahun 2002 sampai 2009.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa dua pertiga pengangguran memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan telah lulus minimal SMA, bila dibandingkan kurang dari 20 persen tenaga kerja di NTT secara keseluruhan. Alasannya adalah karena mereka yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi tidak miskin sehingga mereka mampu menghidupi keluarganya walaupun dalam kondisi menganggur. Hal ini menegaskan bahwa pengangguran sangat tinggi di antara remaja kota yang berpendidikan tinggi, yaitu fakta banyak terdapat secara nasional.[17] Tingkat pengangguran yang tinggi di antara kelangan terpelajar, menunjukkan kurang menariknya peluang pekerjaan yang ada di NTT bagi pekerja yang memenuhi syarat. Meskipun demikian, hal ini mungkin juga dikarenakan masalah yang terkait dengan relevansi pendidikan, ketidak sesuaian antara permintaan dan suplai keterampilan, dan mungkin, harapan kerja yang berlebihan di antara lulusan pendidikan. Dalam hal apapun, fenomena ini membutuhkan adanya perhatian khusus karena ia menunjukkan adanya pemakaian sumber daya manusia yang kurang efisien sehingga dapat mengakibatkan terjadinya perpindahan para tenaga kerja terdidik ke daerah lain atau brain drain, karena kaum muda dan terpelajar pindah dari provinsi ini untuk mencari pekerjaan di daerah lain.

17 ADB, ILO & IDB, 2010.

Tabel 4.2: Latar belakang pendidikan pekerja berdasarkan jenis kelamin di NTT, 2002 & 2009 (%)

		Tidak lulus SD	SD	SMP	SMA	Pendidikan Tinggi	Semua tingkatan
				2002			
Di Pasar Tenaga Kerja		**31.3**	**42.9**	**10.7**	**12.3**	**2.7**	**100.0**
Indonesia		***21.9***	***36.7***	***17.4***	***19.2***	***4.9***	***100.0***
	Laki-laki	28.7	41.2	12.4	14.1	3.6	100.0
	Perempuan	34.7	45.0	8.7	10.0	1.7	100.0
Bekerja		**32.3**	**43.7**	**10.7**	**10.7**	**2.6**	**100.0**
	Laki-laki	29.3	41.8	12.4	13.1	3.4	100.0
	Perempuan	35.9	46.2	8.6	7.7	1.6	100.0
Tidak Bekerja		**11.4**	**24.6**	**11.3**	**46.7**	**6.1**	**100.0**
	Laki-laki	11.7	27.5	12.8	40.1	8.0	100.0
	Perempuan	11.1	22.0	9.9	52.9	4.2	100.0
				2009			
Di Pasar Tenaga Kerja		**36.5**	**30.9**	**13.4**	**14.5**	**4.8**	**100.0**
Indonesia		***23.0***	***27.4***	***18.6***	***23.5***	***7.5***	***100.0***
	Laki-laki	36.0	29.2	14.4	15.9	4.5	100.0
	Perempuan	37.1	33.1	12.0	12.6	5.1	100.0
Employed		**37.5**	**31.6**	**13.6**	**13.0**	**4.3**	**100.0**
	Laki-laki	36.6	29.6	14.5	14.9	4.4	100.0
	Perempuan	38.8	34.3	12.2	10.4	4.2	100.0
Unemployed		**11.0**	**13.2**	**9.1**	**50.5**	**16.2**	**100.0**
	Laki-laki	15.8	15.2	11.1	49.2	8.8	100.0
	Perempuan	7.7	11.9	7.6	51.5	21.3	100.0

Sumber: BPS (2009a., 2002)

Keterangan:

- Tidak lulus SD adalah mereka yang tidak bersekolah atau tidak/belum menyelesaikan SD
- Pendidikan tinggi adalah mereka yang memiliki Diploma I/II/III dan/atau universitas

Tingkat pendidikan tenaga kerja di desa adalah jauh lebih rendah dari tenaga kerja kota (**Tabel 4.3**). Pada tahun 2009, lebih dari 70 persen tenaga kerja desa memiliki tingkat pendidikan yang rendah (SD atau kurang) sementara lebih dari separoh tenaga kerja kota lulus SMA atau pendidikan yang lebih tinggi. Perbedaan ini kemungkinan besar menunjukkan adanya perbedaan akses pendidikan setelah SD antara kota dan desa, serta kurangnya lapangan pekerjaan bagi kalangan terpelajar dan pekerja terampil di desa. Tingkat pengangguran yang tinggi di antara kaum terpelajar menunjukkan adanya masalah. Tampaknya pendidikan setelah SD meningkatkan kecenderungan untuk pindah ke kota.

Dari waktu ke waktu, tingkat pendidikan tenaga kerja desa tampaknya telah mengalami sedikit peningkatan. Prosentase tenaga kerja desa yang tidak lulus SD sudah berkurang, sementara mereka yang mengenyam pendidikan menengah meningkat dari 19 persen menjadi 26 persen. Di daerah pedesaan, ada peralihan dalam hal tingkat pendidikan di kalangan pengangguran. Sementara di tahun 2002, lebih dari separoh pengangguran di desa tidak lulus SD, namun di tahun 2009 mayoritas dari mereka sudah mengenyam tingkat pendidikan SMA.

Tabel 4.3: Latar belakang pendidikan pekerja berdasarkan perkotaan/pedesaan di NTT, 2002 & 2009 (%)

		Tidak lulus SD	SD	SMP	SMA	Pendidikan tinggi	Semua level
				2002			
Di pasar tenaga kerja		**31.3**	**42.9**	**10.7**	**12.3**	**2.7**	**100.0**
Indonesia		***21.9***	***36.7***	***17.4***	***19.2***	***4.9***	***100.0***
	perkotaan	7.1	21.9	15.7	42.8	12.4	100.0
	pedesaan	34.9	46.0	10.0	7.8	1.3	100.0
Bekerja		**32.3**	**43.7**	**10.7**	**10.7**	**2.6**	**100.0**
	perkotaan	6.9	24.0	16.9	39.1	13.1	100.0
	pedesaan	35.4	46.2	9.9	7.2	1.3	100.0
Tidak bekerja		**11.4**	**24.6**	**11.3**	**46.7**	**6.1**	**100.0**
	perkotaan	8.2	12.4	10.3	59.8	9.3	100.0
	pedesaan	14.8	38.3	12.3	32.1	2.5	100.0
				2009			
Di pasar tenaga kerja		**36.5**	**30.9**	**13.4**	**14.5**	**4.8**	**100.0**
Indonesia		***23.0***	***27.4***	***18.6***	***23.5***	***7.5***	***100.0***
	perkotaan	14.0	14.7	17.2	37.7	16.4	100.0
	pedesaan	40.2	33.5	12.7	10.7	2.9	100.0
Bekerja		**37.5**	**31.6**	**13.6**	**13.0**	**4.3**	**100.0**
	perkotaan	14.8	15.4	18.2	35.6	16.1	100.0
	pedesaan	41.0	34.1	12.8	9.6	2.5	100.0
Tidak bekerja		**11.0**	**13.2**	**9.1**	**50.5**	**16.2**	**100.0**
	perkotaan	7.1	8.3	8.6	56.7	19.4	100.0
	pedesaan	13.3	16.0	9.3	47.0	14.3	100.0

Sumber: BPS (2009a., 2002)

Keterangan:

- Tidak lulus SD adalah mereka yang tidak bersekolah atau tidak/belum menyelesaikan SD
- Pendidikan tinggi adalah mereka yang memiliki Diploma I/II/III dan/atau universitas

5. Struktur pekerjaan

5.1. Berdasarkan industri utama

NTT tetap merupakan daerah perekonomian agraris yang besar. Pada tahun 2009, lebih dari dua pertiga total tenaga kerja bekerja di sektor pertanian, kehutanan, berburu dan perikanan (**Tabel 5.1**) dibandingkan angka sekitar 40 persen secara nasional. Manufaktur tetap kurang berkembang, karena hanya menyediakan pekerjaan bagi 6 persen tenaga kerja saja. Sektor jasa juga memainkan peran yang kecil dalam perekonomian, yaitu hanya menyediakan pekerjaan bagi sekitar seperlima tenaga kerja, dibandingkan lebih dari 40 persen secara nasional.

Tabel 5.1: Pekerja berdasarkan industri utama dan jenis kelamin tahun 2009 (%)

	NTT	Indonesia
Pertanian, Kehutanan, Berburu dan Perikanan	**42.3**	**37.0**
Industri	**50.4**	**30.0**
Pertambangan dan Penggalian	37.2	11.9
Industri manufaktur	75.5	43.8
Listrik, Gas dan air	4.0	9.4
Konstruksi	1.3	2.4
Jasa	**37.2**	**42.3**
Perdagangan grosir, perdagangan eceran, restoran dan hotel	58.0	51.0
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	3.3	9.6
Keuangan, Asuransi, Properti dan Layanan Usaha	26.9	29.4
Jasa Sosial dan Pribadi	38.0	44.3
Semua Industri	**42.1**	**37.9**

Sumber: BPS, 2009a.

Dengan sedikit pengecualian, tidak ada perbedaan besar dalam hal gender di bidang struktur tenaga kerja industri. Pertanian tampaknya sama pentingnya bagi pekerja laki-laki dan perempuan **(Tabel 5.1).**

Temuan penting:

Tingkat pendidikan kalangan pekerja di NTT secara umum masih rendah. Dimana dua pertiga dari mereka hanya lulus SD. Hanya 5 persen tenaga kerja di NTT yang mengenyam pendidikan lebih tinggi. Namun latar belakang pendidikan mereka jauh di belakang angka nasional. Baik latar belakang pendidikan maupun

tingkat pendaftaran sekolah di NTT adalah jauh lebih rendah bila dibandingkan angka nasional. NTT perlu mengejar mutu sumber daya manusianya.

Fakta yang menarik adalah bahwa dua pertiga pengangguran di NTT telah mengenyam pendidikan minimal SMA. Hal ini disebabkan oleh kurang menariknya pekerjaan bagi mereka yang berketerampilan tinggi, atau karena pendidikan mereka tidak sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja. Kurang menariknya pekerjaan ini telah mempengaruhi permintaan akan pendidikan tinggi.

Meskipun demikian, manufaktur adalah sumber pekerjaan yang jauh lebih penting bagi perempuan daripada laki-laki. Pada tahun 2009, sekitar 11,2 persen pekerja perempuan bekerja di sektor manufaktur, dibandingkan hanya 2.6 persen pekerja laki-laki. Hal ini mungkin disebabkan oleh jenis manufaktur (skala kecil, kerajinan tangan) yang biasanya lebih melibatkan partipasi perempuan daripada laki-laki. Sebagai konsekuensinya, jumlah perempuan adalah sepertiga dari jumlah pekerja yang bekerja di sektor manufaktur di NTT, dibandingkan hanya 42 persen secara nasional (**Tabel 5.2**). Demikian pula halnya di sektor perdagangan, restoran dan hotel, sementara di sektor konstruksi, transportasi, penyimpanan dan komunikasi tetap didominasi kalangan laki-laki. Perlu juga dicatat bahwa walaupun tingkat partisipasi pekerja perempuan rendah, namun prosentase perempuan dalam tenaga kerja secara keseluruhan adalah masih tinggi di NTT daripada di tingkat nasional (**Tabel 5.2**).

Tabel 5.2: Prosentase pekerja perempuan tahun 2009 (%)

	NTT	Indonesia
Pertanian, Kehutanan, Berburu dan Perikanan	**42.3**	**37.0**
Industri	**50.4**	**30.0**
Pertambangan dan Penggalian	37.2	11.9
Industri manufaktur	75.5	43.8
Listrik, Gas dan air	4.0	9.4
Konstruksi	1.3	2.4
Jasa	**37.2**	**42.3**
Perdagangan grosir, perdagangan eceran, restoran dan hotel	58.0	51.0
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	3.3	9.6
Keuangan, Asuransi, Properti dan Layanan Usaha	26.9	29.4
Jasa Sosial dan Pribadi	38.0	44.3
Semua Industri	**42.1**	**37.9**

Sumber: BPS, 2009a.

Seperti yang diperkirakan, ada perbedaan besar antara desa dan kota dalam hal komposisi tenaga kerja di bidang industri. Pertanian mendominasi lapangan pekerjaan secara keseluruhan di desa dimana lebih dari tiga perempat pekerja desa bekerja. Sebaliknya, jasa mendominasi perekonomian dan pasar tenaga kerja di perkotaan, dimana lebih dari tiga perempat pekerja di kota bekerja. Namun perlu dicatat juga adanya prosentase sektor jasa yang kecil di desa. Tidak saja di sektor transportasi dan keuangan, tapi juga di sektor jasa perdagangan dan sosial & pribadi – yang merupakan jasa layanan umum – yang menyediakan sebagian kecil pekerjaan di desa. Di sisi lain, manufaktur nampaknya menjadi sumber pekerjaan yang lebih penting di desa daripada di kota. Tampaknya perempuan desa mendominasi pekerjaan manufaktur secara keseluruhan. Sifat manufaktur di desa memperlihatkan adalah berupa industri kecil rumah tangga dan kerajinan tangan.

Tabel 5.3: Tenaga kerja berdasarkan industri utama dan perkotaan/pedesaan tahun 2009 (%)

	Perkotaan	Pedesaan
Pertanian, Kehutanan, Berburu dan Perikanan	**10.5**	**76.9**
Industri	**12.6**	**10.3**
Mining dan Penggalian	0.5	1.8
Industri manufaktur	5.5	6.3
Listrik, Gas dan air	0.4	0.1
Konstruksi	6.1	2.1
Jasa	**77.0**	**12.7**
Perdagangan grosir, perdagangan eceran, restoran dan hotel	27.7	3.7
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	11.7	3.1
Keuangan, Asuransi, Properti dan Layanan usaha	2.9	0.2
Jasa sosial dan pribadi	34.7	5.6
Semua industri	**100**	**100**

Sumber: BPS, 2009a.

5.2. Berdasarkan status pekerjaan utama

Wirausaha adalah bentuk pekerjaan yang paling dominan di NTT. Lebih dari 80 persen tenaga kerja adalah para wirausaha, bila dibandingkan sekitar 60 persen secara nasional (**Tabel 5.4**). Ada beberapa perbedaan besar dalam hal status pekerjaan laki-laki dan perempuan. Di antara mereka yang bekerja, laki-laki memiliki kesempatan dua kali lebih besar untuk memperoleh pekerjaan berupah dari pada perempuan.

Seperti yang diperkirakan, wirausaha adalah hal yang paling umum terdapat di daerah pedesaan, sementara di kota, jumlah pekerjaan berupah menduduki lebih dari separoh pekerjaan yang ada. Tingkat wirausaha yang sangat tinggi di desa menunjukkan rendahnya diversifikasi ekonomi, usaha kecil, dan usaha milik sendiri. Namun hal ini juga menunjukkan bahwa tidak adanya lahan, memaksa mereka bekerja di lahan orang lain sebagai buruh harian, mungkin bukan merupakan permasalahan utama.

Tabel 5.4: Pekerja berdasarkan status pekerjaan utama di NTT dan Indonesia, 2009 (%)

	Pengusaha	Pekerja berupah	Wirausaha	Total
NTT				
Perempuan	0.5	11.6	88.0	100.0
Laki-laki	2.1	20.1	77.8	100.0
Total (%)	**1.4**	**16.5**	**82.1**	**100.0**
Total (1,000)	**30.6**	**356.2**	**1,773.9**	**2,160.7**
Pedesaan	1.0	10.8	88.2	100.0
Perkotaan	4.1	54.0	41.9	100.0
INDONESIA				
Perempuan	1.3	34.1	64.6	100.0
Laki-laki	3.9	41.6	54.5	100.0
Total (%)	**2.9**	**38.8**	**58.3**	**100.0**
Total (1,000)	**3,033**	**40,663**	**61,174**	**104,870**
Pedesaan	2.2	28.8	69.0	100.0
Perkotaan	3.8	53.0	43.1	100.0

Sumber: BPS, 2009a.

Keterangan:

- Pengusaha = Pengusaha dibantu oleh pekerja tetap[18]
- Pekerja berupah = Pekerja + pekerja harian di sektor pertanian + pekerja harian pra dan pasca panen[19]
- Wirausaha = pekerja sendiri + pengusaha yang dibantu oleh pekerja sementara /pekerja tanpa upah + pekerja keluarga[20]

Status pekerjaan adalah status seseorang di tempat kerja. Ada 7 kategori pekerjaan menurut ILO. Perlu dicatat bahwa untuk tujuan penelitian ini, kategori-kategori tersebut dikelompokkan menjadi 3.

18 **Pengusaha dibantu pekerja tetap**: adalah orang yang melaksanakan usaha dibantu pekerja tetap berupah

19 **Pekerja**: orang yang bekerja untuk orang lain atau suatu lembaga berdasarkan kontrak yang stabil dengan upah tunai atau sejenisnya

Pekerja harian di sektor pertanian: adalah orang yang bekerja dengan resiko sendiri tanpa bantuan anggota keluarganya atau pekerja di sektor pertanian

Pekerja harian non pertanian: adalah orang yang bekerja dengan resiko sendiri tanpa bantuan anggota keluarganya atau pekerja yang bekerja di luar sektor pertanian

20 **Wirausaha**: adalah mereka yang bekerja sendiri atau dengan satu atau lebih mitra, dan melaksanakan jenis pekerjaan yang ditetapkan sebagai "pekerjaan wirausaha", dan tidak menggunakan "pekerja" secara terus menerus selama masa referensi

Pengusaha dibantu pekerja sementara/pekerja tanpa upah

Pekerja tanpa upah: adalah orang yang bekerja tanpa upa di sebuah perusahaan ekonomi melalui anggota keluarga lain, sanak keluarga atau tetangga.

6. Informalitas

Kegiatan informal mengacu pada kegiatan ekonomi yang biasanya dilakukan secara tradisional dengan tingkat organisasi atau tanpa struktur organisasi yang jelas, tanpa pembukuan dan ada hubungan kerja. Sebagian besar kegiatan ini berupa pekerjaan harian, berdasarkan persahabatan atau hubungan pribadi dan bukan melalui kontrak kerja.[21]

Terdapat hubungan antara bekerja di sektor ekonomi informal dan kemiskinan, karena kurangnya peraturan tenaga kerja dan perlindungan sosial yang mencakup pekerja di sektor ekonomi informal dan fakta bahwa pekerja di sektor perekonomian informal memperoleh upah rata-rata kurang dari pekerja di sektor perekonomian formal. Oleh karena itu, ekonomi informal merupakan tantangan bagi para pembuat kebijakan.

Sektor informal menyerap sebagian besar pekerja terutama di NTT, dimana 81 persen pekerja bekerja di sektor informal tahun 2008 dibandingkan 61 persen di tingkat nasional. NTT memang memiliki prosentase pekerjaan di sektor informal tertinggi dari semua provinsi di Indonesia tahun 2008. Prevalensi pekerjaan informal sangat menyerap pekerja di daerah pedesaan dan di kalangan pekerja perempuan (gambar 4).

Gambar 4

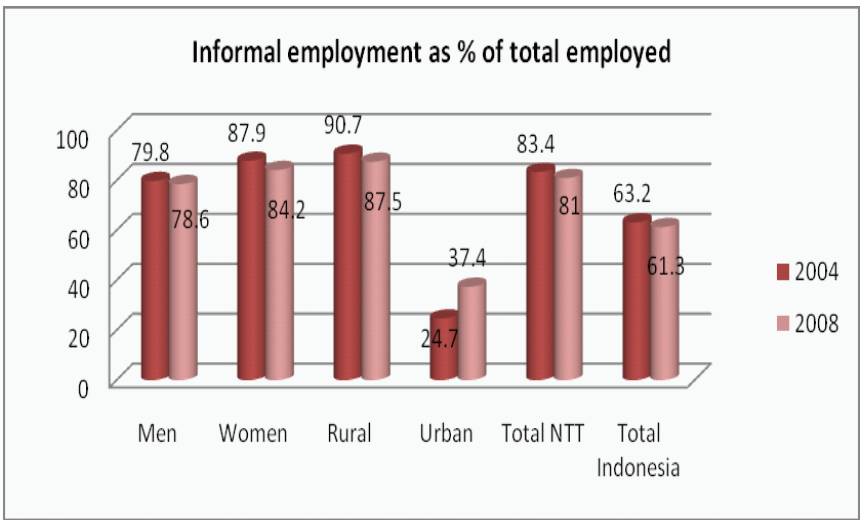

Sumber: BPS (2008a., 2006)

21 Menurut definisi ILO– Kegiatan informal diperoleh dari tabulasi silang antara dua variabel: status pekerjaan dan pekerjaan utama (lihat LAMPIRAN)

Kecenderungan yang nyata tampak bila dilihat dari latar belakang pendidikan pekerja di sektor informal. Semakin tinggi tingkat pendidikan pekerja maka semakin kecil kemungkinan mereka bekerja di sektor informal (**Tabel 6.1**). Tampaknya ada jalur pemisah dalam hal ini antara SMP dan SMA. ***Lebih dari 80 persen tenaga yang memiliki tingkat pendidikan SMP atau kurang bekerja di sektor informal tahun 2008. Sebaliknya, hanya separoh pekerja dengan latar pendidikan SMA dan kurang dari 10 persen mereka yang memiliki latar pendidikan yang lebih tinggi bekerja di sektor informal.*** Tidak ada kecenderungan yang jelas dalam hal pekerjaan informal berdasarkan kelompok usia. Bagi perempuan, kemungkinan ini sangat tinggi di semua kelompok usia, sementara bagi laki-laki angka ini lebih rendah di antara mereka yang berusia 25-49 tahun dari pada kelompok usia yang lebih muda dan lebih tua.

Tabel 6.1: Prosentase pekerja dengan kegiatan informal dari total pekerja dengan latar belakang pendidikan, 2008

	Tidak Lulus SD	SD	SMP	SMA	Pendidikan Tinggi	Total
Perempuan	92.0	93.0	85.9	45.3	9.3	84.2
Laki-laki	91.5	87.4	78.2	48.1	9.2	78.6
Total	**91.7**	**89.9**	**81.1**	**47.1**	**9.3**	**81.0**
Total Indonesia	***82.4***	***74.0***	***60.4***	***37.9***	***11.7***	***61.3***
Pedesaan	93.3	92.5	88.0	58.3	14.0	87.5
Perkotaan	60.3	53.6	48.3	28.9	4.5	37.4

Sumber: BPS, 2008a.

Keterangan:

- Tidak lulus SD adalah mereka yang tidak bersekolah, atau tidak/belum lulus SD
- Pendidikan tinggi adalah mereka yang memiliki Diploma I/II/III dan/atau universitas

Seperti yang diperkirakan, informalitas sangat bervariasi antar sektor ekonomi. Di bidang pertanian, informalitas adalah satu-satunya bentuk pekerjaan yang ada (**Tabel 6.3**). Meskipun demikian, informalitas juga mendominasi sektor manufaktur. Dua pertiga pekerjaan di sektor ini bersifat informal, sehingga tentunya mencerminkan kondisi umum adalah industri desa, kecil skala rumah tangga dan bukan perusahaan manufaktur modern di kota. Hal ini membuat sektor manufaktur di NTT sangat berbeda dari sektor manufaktur lain secara nasional, dimana kurang dari 30 persen pekerjaan bersifat informal. Seperti yang diperkirakan, pekerjaan di bidang perdagangan, restoran dan hotel juga lebih bersifat informal. Hanya di layanan sektor publik dimana pekerjaan formal berlaku secara menyeluruh.

Tabel 6.2: Prosentase pekerjaan informal dibandingkan total pekerjaan berdasarkan sektor, 2008

	Pertanian, Kehutanan, Berburu dan Perikanan	Industri manufaktur	Perdagangan grosir, perdagangan eceran, restoran dan hotel	Layanan masyarakat, jasa sosial dan pribadi
Perempuan	99.5	72.4	66.2	5.4
Laki-laki	98.0	51.3	46.7	6.2
Total	**98.6**	**66.5**	**58.0**	**5.9**
Indonesia	***91.5***	***29.2***	***53.6***	***18.9***
Pedesaan	98.8	68.6	60.7	4.1
Perkotaan	86.6	47.3	55.9	7.7

Sumber: BPS, 2008a.

7. Kerangka Kerja Makroekonomi

7.1. PDB provinsi berdasarkan sumber produksi

Dari waktu ke waktu, PDB provinsi telah berkembang dengan tingkat yang lebih rendah dari PDB nasional, terutama selama beberapa tahun belakangan ini. Pada tahun 2008, pertumbuhan PDB adalah sebesar 4,8 persen di NTT sementara PDB nasional adalah sebesar 6,1 persen (**Gambar 5**). Oleh karena itu, kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara NTT dengan nasional, sebagaimana diukur melalui PDB per kapita, telah melebar beberapa tahun belakangan ini. Pada tahun 2000, PDB per kapita di NTT adalah sebesar 31 persen dari PDB per kapita di negeri ini yang mencatat 22,9 persen pada tahun 2008.

Gambar 5:

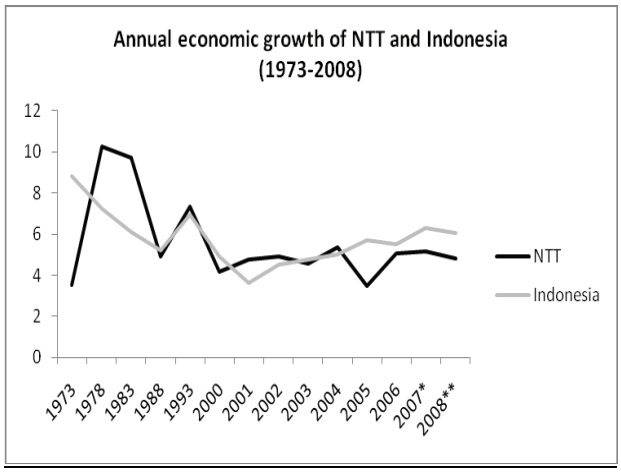

Sumber: BPS, 2009c.

Di NTT, ada perbedaan besar antar kabupaten dalam hal PDB per kapita. Pada tahun 2008, besar PDB per kapita nasional adalah empat kali lebih besar dari NTT. Meskipun demikian, Kota Kupang, ibu kota provinsi NTT, memiliki PDB per kapita tertinggi dari dua puluh kabupaten yang ada, yaitu sekitar separoh PDB per kapita untuk Indonesia, dan dua kali lebih besar dari PDB per kapita rata-rata di NTT. Sebaliknya, beberapa kabupaten seperti Manggarai Timur dan Sumba Barat Daya jauh di belakang angka rata-rata provinsi, dengan PDB per kapita lebih dari separoh angka NTT secara keseluruhan (**tabel 7.1**)

Tabel 7.1: PDB per kapita berdasarkan kabupaten, 2008

	NTT=1	Indonesia=1
Sumba Barat	1.19	0.27
Sumba Timur	1.08	0.25
Kupang	1.04	0.24
Timor Tengah Selatan	0.89	0.20
Timor Tengah Utara	0.72	0.16
Belu	0.70	0.16
Alor	0.77	0.18
Lembata	0.63	0.15
Flores Timur	0.99	0.23
Sikka	1.02	0.23
Ende	1.22	0.28
Ngada	1.18	0.27
Manggarai	0.81	0.18
Rote Ndao	0.86	0.20
Manggarai Barat	0.85	0.20
Sumba Barat Daya	0.59	0.14
Sumba Tengah	0.80	0.18
Nagekeo	0.96	0.22
Manggarai Timur	0.53	0.12
Kota Kupang	2.36	0.54
NTT	**1.00**	0.23
Indonesia	4.37	**1.00**

Sumber: BPS, 2009c.

Tabel 7.2: Sektor distribusi pekerjaan dan PDB, 2002-2008

Prosentase pekerjaan	2002	2006	2008
Pertanian, kehutanan, berburu dan perikanan	**73.1**	**74.5**	**69.4**
Industri	**11.4**	**10.7**	**10.0**
Pertambangan dan penggalian	0.8	0.2	0.9
Industri manufaktur	8.4	8.3	6.8
Listrik, gas dan air	0.0	0.1	0.1
Konstruksi	2.3	2.2	2.3
Jasa	**15.4**	**14.8**	**20.5**
Perdagangan grosir, perdagangan eceran, restoran dan hotel	6.0	4.7	6.8
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	1.8	3.1	4.7
Keuangan, asuransi, rel estat dan layanan usaha	0.7	0.3	0.5
Jasa sosial dan pribadi	6.9	6.6	8.6
Semua sektor	**100.0**	**100.0**	**100.0**

Prosentase PDB	2004	2006	2008
Pertanian, kehutanan, berburu dan perikanan	**41.9**	**40.8**	**39.6**
Industri	**10.3**	**9.9**	**9.5**
Pertambangan dan penggalian	1.4	1.3	1.3
Industri manufaktur	1.6	1.6	1.5
Listrik, gas dan air	0.4	0.4	0.4
Konstruksi	6.9	6.6	6.3
Jasa	**47.8**	**49.3**	**50.8**
Perdagangan grosir, perdagangan eceran, restoran dan hotel	16.0	16.3	16.4
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	6.6	6.9	7.3
Keuangan, asuransi, rel estat dan layanan usaha	2.9	3.0	3.5
Jasa sosial dan pribadi	22.3	22.9	23.6
Semua sektor	**100.0**	**100.0**	**100.0**

Sumber: BPS (2009e., 2006, 2002) 2006)

Tabel 7.3: PDB berdasarkan sektor dan sub sektor, 2008. Prosentase

	Distribusi PDB	Pertumbuhan tahun 2008
Pertanian	**39.6**	**3.7**
Tanaman pangan	19.8	4.3
Tanaman perkebunan	4.5	4.2
Peternakan & produk hewan	11.2	2.7
Kehutanan	0.3	6
Perikanan	3.7	2.5
Pertambangan & penggalian	**1.3**	**4.1**
Manufaktur	**1.5**	**0.04**
Pasokan listrik, gas & air	**0.4**	**3.5**
Konstruksi	**6.3**	**2.9**
Perdagangan	**16.4**	**4.8**
Perdagangan grosir & eceran	15.9	4.8
Hotel & restoran	0.5	4.6

	Distribusi PDB	Pertumbuhan tahun 2008
Transportasi & komunikasi	**7.5**	**11.0**
Transportasi	6	9.8
Komunikasi	1.5	15.8
Kepemilikan keuangan & usaha	**3.5**	**3.3**
Jasa	**23.6**	**5.9**
Pemerintah	17.1	6.8
Swasta	6.4	3.7
PDB	**100**	**4.81**

Keterangan: Berdasarkan harga konstan tahun 2000
Sumber: BPS, 2009c (hal 428/433)

Sifat agraris yang sangat kental dan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan diversifikasi tampak tercermin melalui komposisi sektor PDB dan pekerjaan (**Tabel 7.2**).

Ekonomi sangat didominasi oleh sektor pertanian yaitu hampir 70 persen dari total pekerjaan yang ada dan 40 persen PDB tahun 2008. Sub-sektor pertanian yang utama adalah tanaman pangan lalu diikuti peternakan (**Tabel 7.3**).

Jasa merupakan cabang ekonomi terpenting kedua, yaitu sekitar seperlima dari total pekerjaan yang ada dan separoh dari PDB provinsi. Dalam cabang ekonomi ini, jasa sosial dan pribadi mendominasi kontribusi terhadap PDB dan pekerjaan, diikuti oleh perdagangan (grosir dan eceran). Layanan sektor publik, ternyata, memberikan 17,1 persen kontribusi dari total PDB tahun 2008 dan menyediakan sumber utama pekerjaan di luar pertanian.

Ada sedikit peralihan dalam struktur sektor PDB dan pekerjaan antara tahun 2002 dan 2008. Namun prosentase pertanian dalam PDB dan pekerjaan menurun setelah tahun 2006. Prosentase manufaktur yang sudah kecil juga tampak menurun dalam hal pekerjaan, namun tetap konstan dalam hal PDB. Prosentase manufaktur dalam pekerjaan adalah jauh lebih tinggi dari prosentase PDB nya, dan ini menunjukkan sangat rendahnya produktivitas pekerja di sektor ini. Sebaliknya, kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB hampir tiga kali lebih tinggi dari kontribusinya terhadap pekerjaan.

Prosentase layanan terhadap PDB dan pekerjaan meningkat selama periode ini. Prosentase layanan terhadap PDB meningkat dari 47,8 persen tahun 2002 menjadi 50,8 persen tahun 2008, hal ini terutama dikarenakan oleh pertumbuhan pesat di bidang transportasi, penyimpanan dan komunikasi, yang tumbuh sebesar 11 persen per tahun (**Tabel 7.3**). Prosentase layanan terhadap total pekerjaan tampak konstan hingga tahun 2006, yaitu sekitar 15 persen, dimana setelah itu ia melonjak hingga lebih dari 20 persen tahun 2008. Peningkatan pekerjaan yang sangat tajam di bidang jasa setelah tahun 2006 sangatlah mengejutkan. Hal ini perlu diselidiki lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya dan apakah hal ini dapat dijaga keberlangsungannya.

Hal tersebut di atas menunjukkan kurang berkembangnya sektor manufaktur. Pada tahun 2008, sektor manufaktur masih kurang dari 2 persen dari PDB sedangkan pertumbuhan ekonomi nyaris tidak mengalami peningkatan sama sekali. Salah satu penyebabnya mungkin karena sektor manufaktur terdiri dari beberapa perusahaan berskala sangat kecil yang menggunakan modus produksi yang tradisional dan bukan menggunakan mesin. Usaha mikro ini berjumlah 94 persen dari semua perusahaan di NTT pada tahun 2006; dimana lebih dari 80 persen tenaga kerja bekerja di perusahaan mikro ini.[22] Sebagian besar usaha (tidak termasuk usaha tani) adalah perdagangan grosir dan eceran serta industri manufaktur.

22 BPS, sensus ekonomi, 2006

Tabel 7.4: Produktivitas pekerja berdasarkan sektor utama tahun 2006 dan 2008. Total produktivitas pekerja setiap tahun = 100.

	2006	2008
Pertanian, kehutanan, berburu dan perikanan	**55**	**57**
Industri	**92**	**95**
(Pertambangan dan penggalian)	*(784)*	*(147)*
Industri manufaktur	19	22
(Listrik, gas dan air)	*(635)*	*(306)*
Konstruksi	305	278
Jasa	**334**	**248**
Perdagangan grosir, perdagangan eceran, restoran dan hotel	345	242
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	223	157
(Keuangan, asuransi, rel estat dan layanan usaha)	*(1048)*	*(731)*
Jasa sosial dan pribadi	346	273
Semua sektor	**100**	**100**

Keterangan: Angka-angka dalam tanda kurung menunjukkan bahwa prosentase pekerjaan kurang dari 1 persen dari jumlah keseluruhan
Sumber: Kalkulasi berdasarkan BPS (2009e., 2008a., 2006)

Produktivitas pekerja sangat bervariasi tergantung sektor ekonomi (**Tabel 7.4**). Produktivitas pekerja di sektor pertanian, sektor yang paling penting, menduduki sekitar 57 persen dari tingkat ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, produktivitas pekerja di bidang jasa adalah dua kali lipat lebih tinggi dari tingkat ekonominya. Tingkat produktivitas yang sangat rendah di sektor manufaktur tampak menonjol dan di luar dugaan. Hal ini mungkin disebabkan oleh tingkat teknologi yang sangat rendah, cara produksi yang tradisional serta minimnya penggunaan mesin. Tingginya produktivitas di bidang layanan sektor publik (sebagian besar layanan sosial) perlu diterjemahkan secara hati-hati, karena nilai tambah sebagian besar layanan publik ditentukan oleh biaya dan bukan nilai pasar. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa produktivitas di bidang perdagangan, yaitu sumber pekerjaan utama yang lain, berada jauh di atas angka rata-rata untuk ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 7.5

Kontribusi terhadap pekerjaan	**2002-2006**	**2006-2008**
Pertanian, kehutanan, berburu dan perikanan	**95.5**	**-19.5**
Industri	**-0.3**	**-1.9**
Pertambangan dan penggalian	-9.4	13.5
Industri manufaktur	7.7	-20.9
Listrik, gas dan air	1.0	1.2
Konstruksi	0.4	4.3
Jasa	**4.8**	**121.4**
Perdagangan grosir, perdagangan eceran, restoran dan hotel	-14.3	42.4
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	23.3	31.6
Keuangan, asuransi, properti dan layanan usaha	-6.8	3.8
Jasa sosial dan pribadi	2.6	43.6
Semua sektor	**100.0**	**100.0**
Pertumbuhan pekerjaan tahunan (%)	***1.6%***	***2.8%***
Perubahan absolut (2002-2008)	***120'321***	***112'918***

Kontribusi terhadap nilai tambah	2004-2006	2006-2008
Pertanian, kehutanan, berburu dan perikanan	**28.7**	**28.0**
Industri	**5.6**	**5.7**
Pertambangan dan penggalian	0.8	1.0
Industri manufaktur	1.4	0.6
Listrik, gas dan air	0.4	0.3
Konstruksi	3.0	3.8
Jasa 65.6	**66.4**	
Perdagangan grosir, perdagangan eceran, restoran dan hotel	20.6	17.1
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	10.9	11.0
Keuangan, asuransi, properti dan Layanan usaha	4.1	8.3
Jasa sosial dan pribadi	30.1	30.0
Semua sektor	**100.0**	**100.0**
PDB annual % growth	***4.3%***	***5.0%***
Perubahan absolut (milyar rupiah) (2004-2008)	***832***	***1'057***

Sumber: Kalkulasi berdasarkan BPS (2009e., 2008a., 2006, 2002)

Pertumbuhan pekerjaan tahunan meningkat dari 1,6 persen pada periode 2002-2006 menjadi 2,8 persen pada periode 2006-2008, sementara pertumbuhan PDB meningkat dari 4,3 persen menjadi 5 persen pada periode yang sama. Perlu dicatat bahwa angka-angka ini perlu diterjemahkan secara hati-hati. Apabila tingkat pertumbuhan pekerjaan meningkat tajam dari satu periode ke periode lain, maka hal ini dikarenakan pekerjaan berkembang dari angka yang relatif kecil (**tabel 7.5**).

Tabel 7.5 memperlihatkan adanya perbedaan besar antara kontribusi berbagai sektor ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja di satu sisi, dengan nilai tambah, PDB, di sisi lain. Kontribusi sektor ekonomi utama terhadap PDB masih tetap selama periode tersebut. Sektor jasa memberikan kontribusi sebesar dua pertiga dari pertumbuhan PDB, sementara pertanian menyumbangkan 28-29 persen sedangkan industri sisanya 5-6 persen. Seperti yang disebutkan di atas, peran manufaktur dalam pertumbuhan ekonomi masih terabaikan.

Sebaliknya, tampak ada perbedaan nyata dalam distribusi sektor pertumbuhan pekerjaan. Antara tahun 2002 sampai 2006, sektor pertanian mampu menyerap peningkatan pekerjaan secara keseluruhan (95.5 persen). Prosentase jasa dalam menciptakan lapangan kerja (5 persen), menunjukkan kinerja yang sangat berbeda antar sektor jasa. Penciptaan lapangan kerja di sektor transportasi, penyimpanan dan komunikasi setara dengan seperempat total lapangan kerja yang diciptakan, sementara perdagangan grosir dan eceran juga membatu penyerapan tenaga kerja.

Pola penciptaan lapangan kerja tahun 2006-2008 sangat berbeda dari periode sebelumnya. Sektor pertanian telah berubah dari sumber utama penciptaan lapangan kerja baru menjadi sektor penyerap tenaga kerja. Sementara pekerjaan di sektor pertanian meningkat rata-rata 114,000 per tahun antara tahun 2002 dan 2004, namun menurun 22,000 per tahun antara tahun 2006 dan 2008. Dikarenakan peran pertanian sebagai sumber utama penciptaan lapangan kerja baru telah berakhir, sektor jasa menjadi satu-satunya sumber lapangan kerja baru. Secara keseluruhan, pertumbuhan pekerjaan di sektor jasa meningkat dari rata-rata 6,000 per tahun antara tahun 2002 dan 2008 menjadi lebih dari 137,000 per tahun antara 2006 dan 2008. Semua sektor jasa mencatat peningkatan pekerjaan yang pesat setelah tahun 2006. Pekerjaan di sektor perdagangan, restoran dan hotel meningkat rata-rata hampir 48,000 per tahun. Jasa sosial dan pribadi, yaitu pekerjaan di sektor publik, meningkat dengan kadar yang sama, sementara pekerjaan di bidang transportasi, penyimpanan dan komunikasi meningkat lebih dari 35,000 per tahun (**Tabel 7.5**). Penurunan pekerjaan di bidang manufaktur antara

2006 dan 2008 mungkin sebagian dikarenakan oleh penutupan pabrik Semen Kupang, yaitu pabrik manufaktur terbesar di NTT, tahun 2007.[23]

Pola sektor-sektor yang berbeda dalam hal kontribusi terhadap pertumbuhan PDB dan pertumbuhan pekerjaan memiliki implikasi nyata terhadap produktivitas tenaga kerja. Produktivitas pertanian meningkat tajam setelah tahun 2006 karena nilai tambah sektor ini terus meningkat di saat pekerjaan menurun. Di sektor jasa, pada sisi lain, terjadi penurunan pertumbuhan produktivitas setelah tahun 2006, hingga ke titik dimana peningkatan produktivitas menjadi negatif seperti halnya di beberapa sector yang ada, dikarenakan lapangan pekerjaan di sektor-sektor ini meningkat pesat tanpa adanya kenaikan yang berarti dalam hal nilai tambah yang dihasilkan (**tabel 7.4**).

7.2. PDB NTT berdasarkan jenis pengeluaran

Gambar 6:

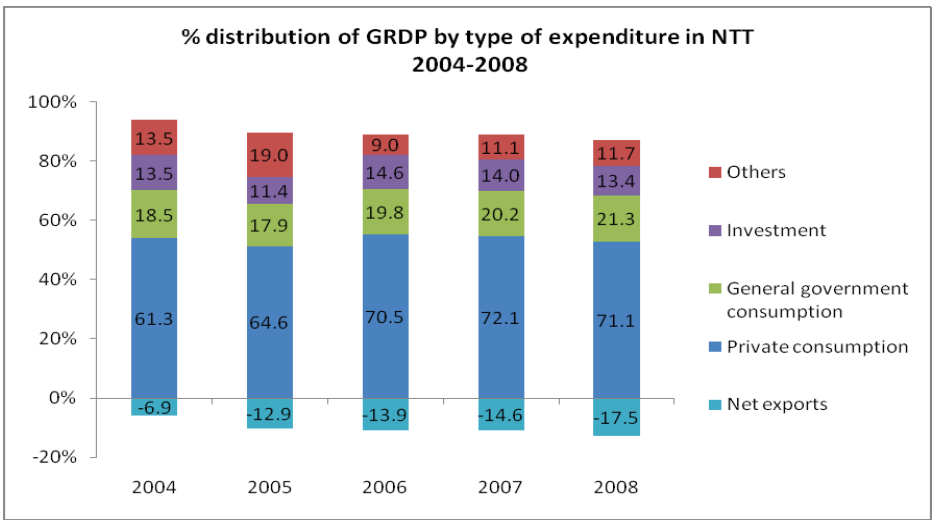

Keterangan: Berdasarkan harga yang berlaku saat ini
Sumber: BPS, 2009c. (p455)

Distribusi jenis pengeluaran produk domestik bruto (PDB) di NTT selama periode 2004-2008 relatif stabil.

Proporsi pengeluaran PDBR yang besar adalah konsumsi swasta, yang meningkat dari 61,3 persen PDBR tahun 2004 menjadi 71,1 persen tahun 2008. Angka kenaikan ini adalah lebih tinggi dari angka nasional dimana pengeluaran konsumsi swasta hanya sebesar 60,6 persen tahun 2008.

Ada dua fakta penting yang terlihat dari **Gambar 6**. Pertama, prosentase investasi belum berubah dari tahun ke tahun dan masih tetap kecil (13,4 persen dari total PDBR tahun 2008) bila dibandingkan angka nasional dimana nilai investasinya dua kali lipat dari NTT, yaitu 27,7 persen dari total PDB tahun 2008. Hal ini perlu menjadi perhatian utama karena tingkat investasi yang jauh lebih besar dibutuhkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara NTT dengan Indonesia secara keseluruhan.

Kedua, NTT tampak semakin tergantung pada daerah lain karena nilai impor NTT lebih besar dari ekspornya. Nilai ekspor bersih (ekspor dikurangi impor) tercatat negatif selama periode tersebut namun positif secara nasional (**gambar 7**). Prosentase ekspor bersih menurun yaitu dari -6,9 persen tahun 2004 menjadi -17,5 persen tahun 2008, ini berarti bahwa nilai impor telah mengalami

23 ILO East Project, 2010 - *draft*

peningkatan pesat selama beberapa tahun ini. Defisit perdagangan yang meningkat didanai terutama melalui transfer publik dari pemerintah pusat dan pada tingkatan yang lebih rendah, melalui remitansi swasta. Meskipun demikian, tanpa memandang sumber dana dari defisit perdagangan ini, perlunya memperkuat ekspor dan menambah nilai komoditas ekspor melalui pemrosesan domestik yang lebih tinggi perlu ditekankan secara khusus karena fakta bahwa nilai ekspor tidak menentu dan cenderung menurun selama beberapa tahun belakangan ini.[24]

Gambar 7:

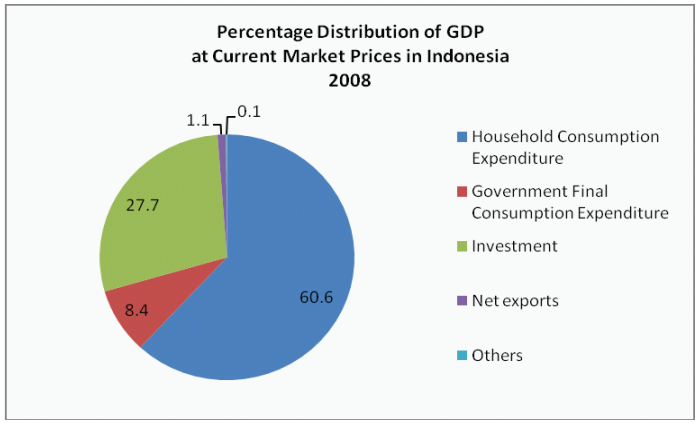

Sumber: BPS, 2009f.

24 ILO East Project, 2010 - *draft*

8. Upah

Pada bagian ini, data tentang upah hanya terkait dengan pekerja berupah, termasuk pekerja yang menerima gaji/upah bulanan serta pekerja harian di sektor pertanian dan di daerah lain yang menerima penghasilan dan pembayaran upah sesuai pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan. Data ini tidak termasuk penghasilan dari kegiatan wirausaha dari para pekerja yang juga wirausahawan. Oleh karena itu, data ini perlu diteliti secara hati-hati karena para pekerja (atau pekerja berupah) berjumlah kurang dari 16 persen dari tenaga kerja yang ada dan lebih dari 80 persen tenaga kerja yang ada merupakan wirausahawan (**Bagian 5.2**). Sejumlah kecil pekerja di setiap sektor disajikan dalam **tabel 8.1**. Perlu dicatat bahwa jumlah pekerjaan informal adalah 81 persen dari total pekerjaan di tahun 2008 (**Bagian 6**).

Di semua sektor kecuali 'layanan masyarakat, Jasa sosial dan pribadi', upah rata-rata per jam di NTT adalah lebih rendah dibandingkan angka nasional. Ada perbedaan upah yang besar antara pertambangan dan penggalian yaitu sebesar Rp. 6,000 per jam. Di NTT dan Indonesia secara keseluruhan, tingkat upah per jam tertinggi dijumpai pada tiga sektor berikut ini: 'Listrik, Gas dan air'; 'Keuangan dan 'Jasa sosial dan pribadi' (**Gambar 8**).

Gambar 8:

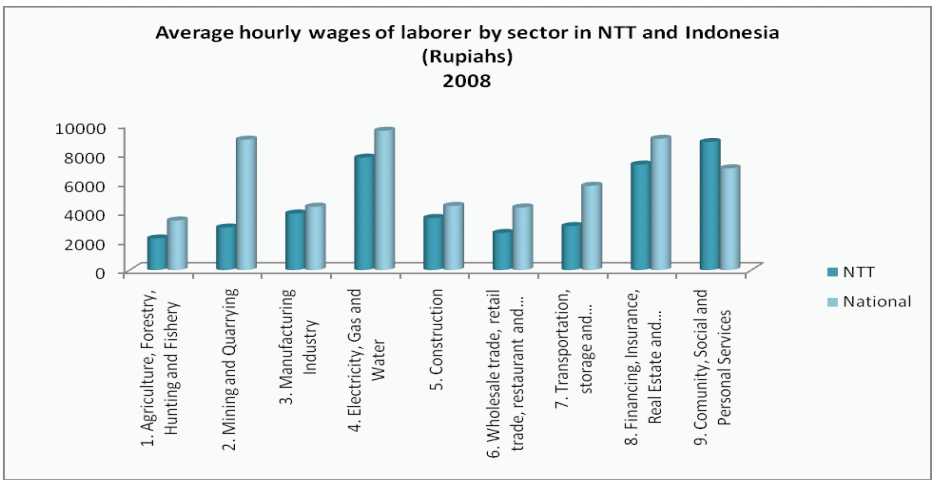

Sumber: BPS, 2008b.

Gambar 9 memperlihatkan bahwa pekerja dengan latar belakang pendidikan tinggi memperoleh upah per jam yang jauh lebih tinggi dari mereka yang berlatar pendidikan rendah. Ada perbedaan besar antara mereka yang telah lulus SMP dengan mereka yang lulus SMA atau bahkan pendidikan tinggi. Para sarjana ini memperoleh upah dua sampai empat kali lipat lebih besar dari lulusan SMP. Upah per jam rata-rata bagi mereka yang memiliki latar pendidikan tinggi adalah lebih dari lima kali lipat mereka yang tidak lulus SD. Hal ini juga terlihat untuk semua tingkatan pendidikan yang diperoleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan sangat besar di antara mereka yang memiliki latar belakang pendidikan SMP.

Gambar 9:

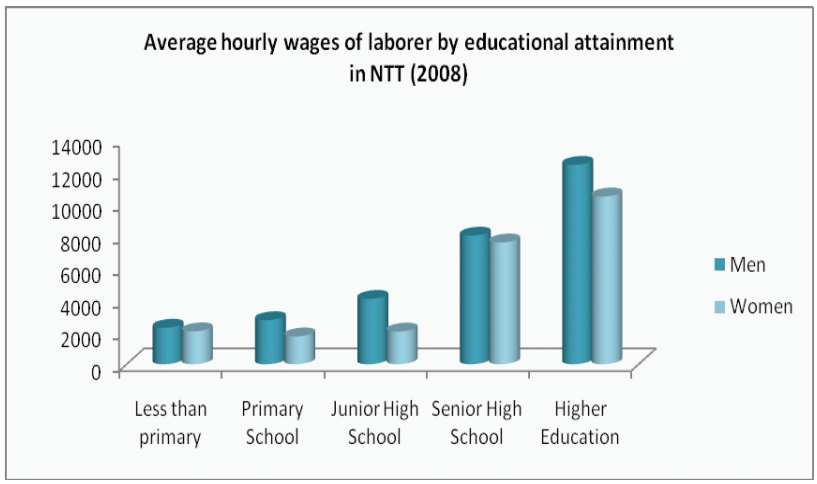

Sumber: BPS, 2008b.

Dilihat dari upah per jam berdasarkan sektor ekonomi, tidak ada bukti nyata yang menyebutkan bahwa laki-laki memperoleh upah yang lebih besar dari perempuan di semua sektor. Upah per jam rata-rata untuk laki-laki lebih dua kali lipat dari perempuan di sektor 'listrik, gas dan air'.[25] Sedangkan di sektor pertanian, industri manufaktur dan layanan masyarakat, jasa sosial dan pribadi, laki-laki memperoleh upah per jam yang juga jauh lebih besar dari perempuan. Sebaliknya, perempuan memperoleh upah yang lebih besar di beberapa sektor seperti pertambangan dan penggalian serta di sektor konstruksi, transportasi dan keuangan **(Gambar 10)**.

Seperti yang terlihat dalam **Gambar 10**, upah minimum per jam (garis putus-putus)lebih tinggi dibandingkan kebutuhan hidup minimal per jam (garis lurus). Meskipun demikian, hanya di empat dari sembilan sector yang ada, terdapat upah rata-rata lebih tinggi dari upah minimum dan kebutuhan hidup minimum. Dalam hal ini, sektor jasa tampak jauh lebih baik, terutama di bidang keuangan, asuransi, rel estat dan layanan usaha serta layanan masyarakat, jasa sosial dan pribadi. Pekerja laki-laki di sektor listrik, gas dan air dan pekerja perempuan di sektor konstruksi juga memperoleh upah yang jauh lebih tinggi dari apa yang dibutuhkan (**Gambar10**).

25 Perlu dicatat bahwa sektor ini hanya mempekerjakan sedikit orang.

Gambar 10:

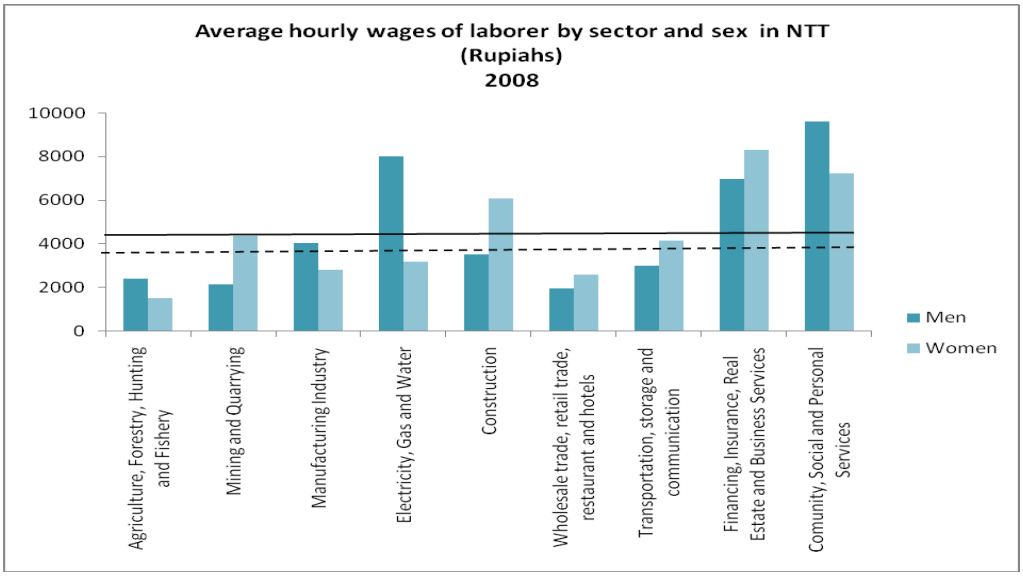

Sumber: BPS (2009d., 2008b)

Keterangan:

- Buruh mencakup pekerja, pekerja harian di sektor pertanian dan pekerja harian pra dan pasca panen
- Upah minimum regional per jam disajikan melalui garis putus-putus secara horisontal. Rp. 650 000 per bulan pada tahun 2008, yaitu Rp. 3 744 per jam dengan asumsi 40 jam kerja per minggu.
- Kebutuhan hidup minimal per jam disajikan melalui garis lurus horisontal. Rp. 735 000 per bulan tahun 2007, yaitu Rp. 4 234 rupiah per jam dengan asumsi 40 jam kerja per minggu.

Buruh di sektor-sektor lain memperoleh upah kurang dari kebutuhan hidup minimum. Hal ini dikarenakan oleh rendahnya produktivitas dan minimnya pekerjaan yang tersedia.[26] Dengan asumsi 40 jam kerja per minggu, rendahnya penghasilan secara keseluruhan mungkin dikarenakan minimnya pekerjaan, baik dalam hal jumlah jam kerja maupun upah per jam yang rendah **(tabel 8.1)**. Kecuali pekerja perempuan di sektor pertanian serta pekerja laki-laki dan perempuan di sektor pertambangan dan penggalian, jam kerja per minggu para pekerja rata-rata lebih dari 40 jam di semua sektor. Di sektor perdagangan, restoran dan hotel jumlah jam kerja mingguan rata-rata adalah lebih dari 50 jam untuk laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa penghasilan di bawah kebutuhan hidup minimal diakibatkan oleh rendahnya produktivitas dan upah per jam dan bukan karena minimnya jam kerja. Meskipun demikian, di sektor pertanian, tingkat penghasilan rata-rata yang sangat rendah untuk pekerja perempuan tampaknya diakibatkan oleh jumlah jam kerja yang sedikit dan upah per jam yang rendah. Sebaliknya di sektor perdagangan, restoran dan hotel, sebagian besar pekerja bekerja sangat lama namun tidak memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pekerjaan yang besar di sektor ini setelah tahun 2006 tidak terjadi karena masyarakat lebih tertarik pada pekerjaan yang baik dan berupah tinggi di sektor ini, tapi karena mereka tidak mempunyai sumber pekerjaan lain. Oleh karena itu, faktor pendorong dan bukan penarik telah menimbulkan perubahan struktural dalam pekerjaan selama beberapa tahun belakangan ini.

26 Minimnya pekerjaan adalah bagi mereka yang bekerja kurang dari jam kerja biasa. Situasi ini mencerminkan kurang pemanfaatan kapasitas produktif tenaga kerja.

Tabel 8.1: Ringkasan upah pekerja di NTT, 2008

	Pekerja		Upah per jam		Jam kerja per minggu		Bekerja kurang dari 40 jam		Upah per jam < kebutuhan hidup minimal (4,234 rupiah per jam)	
	L	**P**	**L**	**P**	**L**	**P**	**L**	**P**	**L**	**P**
1. Pertanian, kehutanan, berburu dan perikanan	24,218	10,270	2,387.3	1,522.1	41	30		x	x	x
2. Pertambangan dan penggalian	4,612	2,941	2,154.2	4,387.1	35	26	x	x	x	
3. Industri manufaktur	8,211	1,763	4,047.2	2,825.1	44	41			x	x
4. Listrik, gas dan air	1,397	84	8,023.5	3,168.2	45	40				x
5. Konstruksi	27,837	688	3,532.8	6,064.4	46	41			x	
6. Perdagangan grosir, perdagangan eceran, restoran dan hotel	10,965	9,700	1,959.4	2,571.3	52	60			x	x
7. Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	33,163	2,003	2,992.2	4,150.3	49	41			x	x
8. Keuangan, asuransi, rel estat dan layanan usaha	5,556	2,157	6,976.7	8,294.1	46	41				
9. Layananmasyarakat, jasa sosial dan pribadi	92,484	63,592	9,625.2	7,246.2	40	42				

Sumber: BPS, 2008b.

9. Ringkasan dan implikasi kebijakan

9.1. Ringkasan

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), tingkat kelahiran dan fertilitas sudah berkurang secara bertahap. Di saat tingkat pertumbuhan penduduk mengalami penurunan sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk usia kerja tetap tinggi selama satu atau dua dekade mendatang, rasio ketergantungan berbasis usia akan meningkat. Disini, "jendela kesempatan demografis" terbuka lebar di NTT.

Meskipun demikian, tingkat kegiatan di NTT telah mengalami penurunan selama lima tahun belakangan ini, dengan tingkat perbedaan yang besar antar jenis kelamin: Tingkat kegiatan untuk perempuan masih jauh di bawah kegiatan laki-laki yaitu sebesar dua puluh persen. Alasan di balik kesenjangan yang besar ini tidak jelas dan perlu perhatian lebih lanjut. Penurunan kegiatan lebih lanjut akan dapat mengurangi dampak dari peningkatan rasio ketergantungan berbasis usia.

Baik capaian pendidikan dan tingkat partisipasi sekolah paska SD di NTT jauh lebih rendah bila dibandingkan angka nasional. Mengingat bahwa pendidikan yang baik merupakan hal utama untuk menciptakan pekerjaan produktif. Pada saat ini, pendidikan hingga SMA ke atas membuka pintu ke pekerjaan formal dengan upah yang jauh lebih besar dari upah rata-rata di NTT. Tingginya pengangguran di kalangan remaja terpelajar menunjukkan adanya prospek yang diharapkan para kaum muda untuk memperoleh pekerjaan produktif. Namun tingginya pengangguran di kalangan kaum muda mungkin juga diakibatkan masalah yang terkait dengan relevansi pendidikan atau ketidaksesuaian antara permintaan pasar tenaga kerja dengan keterampilan yang mereka miliki. Di masa mendatang, tenaga kerja yang berpendidikan tinggi jelas merupakan faktor penting untuk memastikan keberhasilan modernisasi pertanian dan diversifikasi perekonomian. Di samping itu, pendidikan di atas SD juga cenderung akan meningkatkan perpindahan masyarakat dari desa ke kota.

Meskipun demikian, tingkat pengangguran yang sedang dengan tingkat kemiskinan yang tinggi menunjukkan bahwa tantangan pekerjaan yang utama di NTT adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan penghasilan pekerja bagi banyak pekerja miskin, dan bukan sekedar meningkatkan jumlah pekerjaan. Jumlah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan telah mengalami penurunan baik berdasarkan angka absolut maupun prosentase jumlah penduduk; tingkat keparahan kemiskinan juga telah berkurang. Namun kemiskinan tetap tersebar luas di NTT, terutama di daerah pedesaan. Meningkatkan penghasilan pekerja dan lahan pertanian, serta perluasan peluang kerja di luar sektor pertanian, harus dijadikan komponen penting yang tak terpisahkan dari strategi untuk menciptakan pekerjaan produktif dan pekerjaan layak bagi semua orang.

NTT tetap merupakan daerah pertanian yang dominan dimana dua pertiga tenaga kerjanya bekerja di sektor pertanian. Situasi ini menunjukkan luasnya jangkauan wirausaha serta pentingnya sektor informal yang mampu menyerap 80 persen pekerja, terutama mereka dengan latar pendidikan rendah.

NTT berada pada tahap awal industrialisasi. Pertanian tetap menjadi sumber utama pekerjaan, sementara sektor jasa menghasilkan output terbesar di provinsi ini. Industri, khususnya manufaktur, tetap kecil dalam hal output maupun pekerjaan. Selama beberapa tahun belakangan ini, perubahan struktural tampaknya telah dilakukan namun menjauhi sektor pertanian baik dalam hal penciptaan pekerjaan maupun kontribusi terhadap PDB share dan keterkaitan dengan sektor jasa. Meskipun demikian, proses ini tampaknya hal ini dilakukan sebagai faktor pendorong dan bukan dikarenakan adanya faktor penarik. Dalam hal ini, masyarakat didorong keluar dari sektor pertanian karena rendahnya penghasilan, dan bukan ditarik ke sektor jasa melalui peluang pekerjaan yang menarik, dikarenakan tingkat upah rata-rata di sektor perdagangan jauh di bawah upah minimum. Kontribusi sektor manufaktur yang relatif kecil terhadap pekerjaan dan PDB menunjukkan tingkat produktivitas yang sangat rendah di sektor ini.

9.2. Formula untuk menciptakan pertumbuhan kaya lapangan kerja yang berkelanjutan

Nusa Tenggara Timur masih di tahap awal pertumbuhan ekonomi. Struktur ekonomi yang ada sekarang, yang masih didominasi penghasilan berbasis pertanian, tidak berkelanjutan baik secara ekonomi maupun lingkungan. Jika tidak diubah, maka kemiskinan diperkirakan akan terus terjadi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan produktif yang memadai agar penduduk NTT dapat keluar dari kemiskinan, perlu dikaitkan dengan perubahan struktural yang fundamental ini. Walaupun perkembangan ini harus didasari pada kondisi khusus di NTT dan sangat dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat NTT, namun beberapa langkah dasar bagi pertumbuhan ini perlu diidentifikasi.

Sektor pertanian adalah urat nadi perekonomian dan sumber penghasilan yang utama di NTT serta perlu dijadikan titik awal untuk melaksanakan perubahan struktural untuk mengembangkan perekonomian yang berkelanjutan.[27] Intensifikasi pertanian, yang dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan pekerja dan lahan, perlu disesuaikan dengan orientasi pasar produksi yang semakin meningkat. Metoda pembudidayaan baru dengan tujuan ganda meningkatkan intensifikasi dan penghasilan yang lebih besar dengan modus produksi yang berkelanjutan, akan menghasilkan kenaikan investasi pertanian serta meningkatkan pemakaian input tunai untuk produksi pertanian. Hal ini akan membantu memfasilitasi dan mendukung peningkatan produksi untuk pasar.

Diversifikasi ekonomi non-farm (pasca panen atau pra panen) perlu dilaksanakan seiring dengan intensifikasi pertanian. Kedua proses ini perlu saling membantu dan tergantung satu sama lain. Intensifikasi pertanian sangat tergantung ada hubungan ke depan yang erat melalui fasilitas proses pertanian dan akses ke pasar local maupun pasar yang jauh serta hubungan ke belakang yang erat yang menawarkan akses mudah ke input, layanan dan pengetahuan. Perlunya hubungan ini, pada gilirannya nanti akan memberi peluang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi non-farm (pra dan pasca panen) dan peluang pekerjaan. Peningkatan peluang kerja non-farm yang produktif akan membuka peluang terjadinya peralihan secara gradual para pekerja dari pertanian ke sektor-sektor perekonomian yang lain, sehingga menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi pekerja baik bagi mereka yang tetap di pertanian maupun mereka yang beralih dari pertanian. Perkembangan sektor manufaktur yang modern dengan hubungan yang erat dengan pertanian dan perkembangan sumber daya alam yang ada di NTT dan dengan keunggulan komparatif lain untuk diekspor ke provinsi lain

27 Secara luas, pertanian mencakup peternakan dan kehutanan.

dan memenuhi kebutuhan pasar lokal akan menjadi komponen utama dalam strategi diversifikasi ekonomi.

Pengembangan ekspor ke daerah lain di Indonesia atau ke luar negeri perlu dijadikan komponen ketiga dari strategi perkembangan yang dimaksudkan untuk pertumbuhan yang kaya pekerjaan. Perkembangan ekspor yang difokuskan pada produk-produk bernilai tambah akan memberi beberapa manfaat yang penting. Hal ini akan banyak membantu masuknya pengetahuan, inovasi dan keterampilan serta memfasilitasi perkembangan sektor manufaktur berdasarkan teknologi modern dan kemampuan untuk menghasilkan produk-produk bermutu tinggi yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Peningkatan ekspor produk bernilai tambah tinggi juga akan meningkatkan kemungkinan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, karena akan didorong oleh kenaikan permintaan dalam negeri dan permintaan ekspor.

Landasan keempat adalah peningkatan investasi di bidang sumber daya manusia. Tingkat pendidikan di NTT masih tertinggal bila dibandingkan angka nasional secara keseluruhan. Hal ini ditemui tidak saja pada penduduk usia kerja secara keseluruhan, tapi juga penduduk usia muda. Penelitian tentang ketersediaan dan perlunya keterampilan juga menunjukkan adanya kekurangan keterampilan dan ketidak sesuaian antara permintaan dengan keterampilan yang mereka miliki. Strategi yang dimaksudkan untuk pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan membutuhkan komponen kuat yang difokuskan pada upaya untuk memastikan adanya akses universal yang adil ke pendidikan dan pelatihan keterampilan bermutu tinggi, agar dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia dan tenaga kerja secara keseluruhan. Upaya untuk mencegah malnutrisi (kurang gizi) membutuhkan komponen penting lain dalam suatu strategi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Pada saat ini, kurang gizi telah menyebar luas, termasuk di kalangan anak-anak. Hal ini merupakan masalah yang serius karena anak-anak menderita kurang gizi sejak usia dini sehingga dapat mengganggu perkembangan intelektual dan kognitif mereka secara permanen.

Transformasi struktural yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagaimana disebutkan di atas kemungkinan besar tidak akan terjadi sendiri. Untuk itu peran otoritas provinsi dan lokal serta pemangku kepentingan yang lain perlu digerakkan tidak saja untuk menciptakan perkembangan berbasis pasar tapi juga secara aktif membimbing pertumbuhan ekonomi. Prasarana fisik, ekonomi dan sosial merupakan hal yang penting, dan otoritas provinsi dan lokal serta pemangku kepetingan lain harus memainkan peran aktif dalam mengembangkan prasarana tersebut. Analisa diagnostik berikutnya tentang pekerjaan dimaksudkan untuk mengidentifikasi hambatan utama dalam merangsang pertumbuhan ekonomi yang bekelanjutan dan perubahan struktural serta menyediakan basis untuk prioritisasi dan menyusun kebijakan dan intervensi yang mampu menghapus hambatan-hambatan ini.

Perhatian khusus perlu diberikan pada tantangan dalam menciptakan pertumbuhan yang adil. Ketidakadilan pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktural mungkin akan memburuk jika upaya paksa tidak dilakukan agar dapat menciptakan pertumbuhan yang benar-benar bersifat inklusif. Analisa yang lebih terperinci dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber ketidakadilan yang ada saat ini dan kemungkinannya di masa mendatang. Meskipun demikian, pada tahap ini, beberapa persoalan dan faktor yang luas perlu diberikan perhatian khusus.

Sebagaimana yang diperlihatkan dalam analisa di atas, pendidikan setelah SMP membuka pintu untuk memperoleh pekerjaan di sektor formal yang lebih baik. Bagi kaum muda, memperoleh pendidikan yang baik akan meningkatkan kemungkinan mereka untuk keluar dari kemiskinan. Namun sebagian besar tenaga kerja hanya mampu menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Di saat perekonomian berkembang dan menjadi lebih canggih, pendidikan menjadi semakin penting. Akses pendidikan yang merata dan bermutu tinggi akan menjadi faktor tunggal yang paling penting dalam mempromosikan perkembangan yang benar-benar inklusif.

Kondisi geografi NTT, termasuk banyaknya pulau yang membentang di wilayah yang sangat luas, merupakan tantangan besar untuk menciptakan pertumbuhan yang seimbang di wilayah tersebut. Kebijakan dengan kekuatan penuh dan dipikirkan secara matang terkait pembangunan regional tentunya diperlukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang ada tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu, sementara wilayah lain tetap tertinggal.

Persoalan penting ketiga terkait dengan kesetaraan gender. Walaupun dalam hal pendidikan tidak ada perbedaan besar, namun laki-laki cenderung memperoleh pekerjaan yang lebih baik dari perempuan. Sehingga perempuan lebih berkemungkinan berwirausaha atau melaksanakan pekerjaan dengan tingkat produktivitas yang lebih rendah daripada laki-laki. Mereka juga cenderung memperoleh upah yang lebih rendah dari laki-laki. Di saat pertumbuhan ekonomi membawa perubahan struktural, laki-laki dan perempuan perlu diberi peluang yang adil untuk memperoleh manfaat dari adanya perubahan-perubahan ini. Hal ini membutuhkan tingkat mobilitas sosial dan pekerjaan yang tinggi. Hambatan berbasis gender terhadap mobilitas ini perlu diatasi dan dihapus.

9.3. Kesimpulan

Pada saat ini, situasi demografi di NTT diuntungkan oleh rasio ketergantungan berbasis usia yang lebih baik. Dikarenakan pertumbuhan tenaga kerja sudah mulai menurun secara bertahap, kita mungkin perlu memberikan perhatian pada upaya untuk meningkatkan produktivitas dan penghasilan pekerja. Peningkatan rasio ketergantungan juga memungkinkan peningkatan tabungan swasta sebagai investasi. Saat ini, tabungan dan tingkat investasi di NTT masih jauh di bawah apa yang dibutuhkan untuk membawa perekonomian ke jalur pertumbuhan yang pesat. Upaya untuk mendorong investasi swasta perlu dibarengi dengan investasi publik yang lebih tinggi, baik dalam hal sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan) maupun prasarana fisik. Program investasi publik yang lebih ambisius, pada gilirannya nanti perlu dijadikan bagian dari strategi pembangunan yang secara jelas menguraikan pembangunan yang diinginkan untuk NTT dan yang mengakui bahwa peran pemerintah provinsi dan setempat serta pemangku kepentingan lain perlu melakukan hal yang lebih dari sekedar menciptakan kondisi yang kondusif yang pertumbuhan tapi juga secara aktif membimbing pertumbuhan ekonomi dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan dan menempatkan pekerjaan produktif dan pekerjaan layak pada posisi yang tepat.

Referensi

ADB, ILO dan IDB, 2010. *Indonesia: critical development constraints*, Mandaluyong City, Philippines

BPS(Badan Pusat Statistik), 2010. *Hasil sensus penduduk 2010, Data Agregat per Provinsi*, Jakarta, Indonesia

BPS, 2009a. *Labor Force Situation in Indonesia,* Statistiks Indonesia, Jakarta, Indonesia

BPS, 2009b. *Laborer Situation in Indonesia,* Statistiks Indonesia, Jakarta, Indonesia

BPS, 2009c. *Nusa Tenggara Timur in Figures*, Statistiks Indonesia, Jakarta, Indonesia

BPS, 2009d. *Trends of the Selected Socio-Economic Indicators of Indonesia,* Statistiks Indonesia, Jakarta, Indonesia

BPS, 2009e. *Gross Regional Domestik Product of Provinces in Indonesia by Industrial Origin 2004-2008*, Statistiks Indonesia, Jakarta, Indonesia

BPS, 2009f. *Gross Regional Domestik Product of Provinces in Indonesia by Expenditure 2004-2008*, Statistiks Indonesia, Jakarta, Indonesia

BPS, 2008a. *Labor Force Situation in Indonesia,* Statistiks Indonesia, Jakarta, Indonesia

BPS, 2008b. *Laborer Situation in Indonesia,* Statistiks Indonesia, Jakarta, Indonesia

BPS, 2008c. *Nusa Tenggara Timur in Figures*, Statistiks Indonesia, Jakarta, Indonesia

BPS, 2007a. Key *Indicators of Indonesia, Special Edition*, Statistiks Indonesia, Jakarta, Indonesia

BPS, 2007b. *Statistical yearbook,* Statistiks Indonesia, Jakarta, Indonesia

BPS, 2006. *Labor Force Situation in Indonesia,* Statistiks Indonesia, Jakarta, Indonesia

BPS, 2002. *Labor Force Situation in Indonesia,* Statistiks Indonesia, Jakarta, Indonesia

Nurvitria Mumpuniarti for the ILO East Project, 2010. *Skills Gap Analysis for Nusa Tenggara Timur* – working paper unpublished, Jakarta, Indonesia

Taco Bottema, Keppi Sukesi dan Simon Seran, for UNRC, 2009. *NTT at a crossroads* – draft, Kupang, Nusa Tenggara Timur

World Bank, 2010a. *Indonesia Jobs Report: towards better jobs and security for all,* Jakarta

World Bank, 2010b. *Education, Training and Labor Market Outcomes for Youth in Indonesia,* Human Development Department, East Asia dan Pacific Region, Jakarta

Lampiran

A. Pendekatan Kegiatan Informal

Status pekerjaan	Pekerjaan Utama									
	Profesional, pekerja teknis dan terkait	Pekerja administraif dan manajerial	Juru tulis dan pekerja terkait	Penjual	Pekerja jasa	Pekerja pertanian, peternakan, kehutanan, nelayan dan pemburu	Pekerja produksi dan terkait	Operator dan pekerja alat transportasi	Buruh	Lain-lain
Wirausaha	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pengusaha dibantu pekerja sementara / pekerja tanpa upah	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Pengusaha dibantu pekerja tetap	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja harian di sektor pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja harian non pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja tanpa upah	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

F = Formal
INF = Informal

B. Daftar tabel

Tabel 1: Karakteristik pekerja berdasarkan jenis kelamin dan perkotaan/pedesaan. 2002, 2008

Laki-laki

	2002	2008
Jumlah penduduk		
Penduduk usia kerja 15+ tahun	1,198,504	1,489,200
Tenaga kerja 15+ tahun	1,073,207	1,240,502
Bekerja	1,032,505	1,210,342
Menganggur	40,702	30,160
Tidak aktif	125,297	253,098
Tingkat kegiatan (%)	89.5	83.1
Tingkat partisipasi kerja (%)	86.1	81.0
Tingkat pengangguran (%)	3.8	2.4

Perempuan

	2002	2008
Jumlah penduduk		
Penduduk usia kerja 15+ tahun	1,270,163	1,546,800
Tenaga kerja 15+ tahun	863,840	926,417
Bekerja	820,361	875,763
Menganggur	43,479	50,654
Tidak aktif	406,323	624,998
Tingkat kegiatan (%)	68.0	59.7
Tingkat partisipasi kerja (%)	64.6	56.4
Tingkat pengangguran (%)	5.0	5.5

Perkotaan

	2002	2008
Jumlah penduduk		
Penduduk usia kerja 15+	407,187	538,740
Tenaga kerja 15+	249,979	299,849
Bekerja	205,650	270,759
Menganggur	44,329	29,090
Tidak aktif	157,208	238,891
Tingkat kegiatan (%)	61.4	55.7
Tingkat pengangguran (%)	17.7	9.7

Pedesaan

	2002	2008
Jumlah penduduk		
Penduduk usia kerja 15+	2,061,480	2,506,275
Tenaga kerja 15+	1,687,068	1,867,070
Bekerja	1,647,216	1,815,346
Menganggur	39,852	51,724
Tidak aktif	374,412	639,205
Tingkat kegiatan (%)	81.8	74.5
Tingkat kerja (%)	79.9	72.4
Tingkat pengangguran (%)	2.4	2.8

Total

	2002	2008
Jumlah penduduk	3,945,000	4,534,319
Penduduk usia kerja 15+	2,468,667	3,036,000
Tenaga kerja 15+	1,937,047	2,166,919
Bekerja	1,852,866	2,086,105
Menganggur	84,181	80,814
Tidak aktif	531,620	878,096
Rasio ketergantungan, aktual (%)	1.1	1.1
Rasio ketergantungan, berbasis usia (%)	0.6	0.5
Tingkat kegiatan (%)	78.5	71.2
Tingkat partisipasi kerja (%)	75.1	68.5
Tingkat pengangguran (%)	4.3	3.7

Sumber: BPS (2008a., 2002)

Tabel 2: Partisipasi dalam tenaga kerja berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin tahun 2008

Usia	15-24	25-49	50-59	60+	Total
Penduduk usia kerja (000)	917,500	1,469,700	330,300	318,500	3,036,000
Laki-laki	470,100	703,400	162,900	152,800	1,489,200
Perempuan	447,400	766,300	167,400	165,700	1,546,800
Dalam tenaga kerja (000)	502,420	1,206,503	269,245	188,751	2,166,919
Laki-laki	293,526	680,363	153,233	113,380	1,240,502
Perempuan	208,894	526,140	116,012	75,371	926,417
Bekerja (000)	458,177	1,171,533	267,871	188,524	2,086,105
Laki-laki	276,040	668,038	152,884	113,380	1,210,342
Perempuan	182,137	503,495	114,987	75,144	875,763
Menganggur	44,243	34,970	1,374	227	80,814
Laki-laki	17,486	12,325	349	-	30,160
Perempuan	26,757	22,645	1,025	227	50,654
Tidak aktif (000)	415,080	263,197	61,055	129,749	869,081
Laki-laki	176,574	23,037	9,667	39,420	248,698
perempuan	238,506	240,160	51,388	90,329	620,383

Sumber: BPS, 2008a.

Tabel 3a: Tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin dan latar belakang pendidikan di Nusa Tenggara Timur, 2002

	Tidak lulus SD	SD	SMP	SMA	Pendidikan tinggi	Total
Laki-laki	307,679	442,353	133,270	151,768	38,137	1,073,207
Bekerja	302,934	431,177	128,068	135,458	34,868	1,032,505
Menganggur	4,745	11,176	5,202	16,310	3,269	40,702
Perempuan	299,560	388,371	74,788	86,042	15,079	863,840
Bekerja	294,745	378,811	70,500	63,054	13,251	820,361
Menganggur	4,815	9,560	4,288	22,988	1,828	43,479
Kedua jenis kelamin	607,239	830,724	208,058	237,810	53,216	1,937,047
Bekerja	597,679	809,988	198,568	198,512	48,119	1,852,866
Menganggur	9,560	20,736	9,490	39,298	5,097	84,181

Sumber: BPS, 2002

Tabel 3b: Tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin dan latar belakang pendidikan di Nusa Tenggara Timur, 2009

	Tidak lulus SD	SD	SMP	SMA	Pendidikan tinggi	Total
Laki-laki	463,950	376,081	185,785	204,629	58,098	1,288,543
Bekerja	458,175	370,524	181,697	186,604	54,878	1,251,878
Menganggur	5,775	5,557	4,088	18,025	3,220	36,665
Perempuan	357,097	318,387	115,103	121,573	49,425	961,585
Bekerja	353,017	312,125	111,089	94,418	38,206	908,855
Menganggur	4,080	6,262	4,014	27,155	11,219	52,730
Kedua jenis kelamin	821,047	694,468	300,888	326,202	107,523	2,250,128
Bekerja	811,192	682,649	292,786	281,022	93,084	2,160,733
Menganggur	9,855	11,819	8,102	45,180	14,439	89,395

Sumber: BPS, 2009a.

Tabel 4.a: Tenaga kerja berdasarkan Jenis kelamin dan latar belakang pendidikan di Nusa Tenggara Timur, 2002

	Tidak lulus SD	SD	SMP	SMA	Pendidikan tinggi	Total
Perkotaan	17,823	54,840	39,302	106,938	31,076	249,979
Bekerja	14,167	49,356	34,732	80,432	26,963	205,650
Menganggur	3,656	5,484	4,570	26,506	4,113	44,329
Pedesaan	589,416	775,884	168,756	130,872	22,140	1,687,068
Bekerja	583,512	760,632	163,836	118,080	21,156	1,647,216
Menganggur	5,904	15,252	4,920	12,792	984	39,852
Total	607,239	830,724	208,058	237,810	53,216	1,937,047
Bekerja	597,679	809,988	198,568	198,512	48,119	1,852,866
Menganggur	9,560	20,736	9,490	39,298	5,097	84,181

Sumber: BPS, 2002

Tabel 4.b: Tenaga kerja berdasarkan perkotaan/pedesaan dan latar belakang pendidikan di Nusa Tenggara Timur, 2009

	Tidak lulus SD	SD	SMP	SMA	Pendidikan tinggi	Total
Perkotaan	44,568	46,659	54,711	120,011	52,151	318,100
Bekerja	42,278	43,972	51,917	101,593	45,861	285,621
Menganggur	2,290	2,687	2,794	18,418	6,290	32,479
Pedesaan	776,479	647,809	246,177	206,191	55,372	1,932,028
Bekerja	768,914	638,677	240,869	179,429	47,223	1,875,112
Menganggur	7,565	9,132	5,308	26,762	8,149	56,916
Total	821,047	694,468	300,888	326,202	107,523	2,250,128
Bekerja	811,192	682,649	292,786	281,022	93,084	2,160,733
Menganggur	9,855	11,819	8,102	45,180	14,439	89,395

Sumber: BPS, 2009a.

Tabel 5: Pekerja berdasarkan industri utama dan jenis kelamin, 2009

NTT	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki & Perempuan
Pertanian, Kehutanan, Berburu dan Perikanan	**850,288**	**622,339**	**1,472,627**
Industri	**113,711**	**115,668**	**229,379**
Pertambangan dan Penggalian	22,352	13,218	35,570
Industri manufaktur	32,989	101,602	134,591
Listrik, Gas dan air	2,555	106	2,661
Konstruksi	55,815	742	56,557
Jasa	**287,879**	**170,848**	**458,727**
Perdagangan grosir, perdagangan eceran, restoran dan hotel	62,671	86,489	149,160
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	88,964	2,994	91,958
Keuangan, Asuransi, Properti dan Layanan usaha	9,399	3,465	12,864
Jasa sosial dan pribadi	126,845	77,900	204,745
Semua industri	**1,251,878**	**908,855**	**2,160,733**

Sumber: BPS, 2009a.

Tabel 6: LF yang bekerja berdasarkan industri utama dan perkotaan/pedesaan

NTT	Perkotaan	Pedesaan
Pertanian, Kehutanan, Berburu dan Perikanan	**29,953**	**1,442,674**
Industri	**35,882**	**193,497**
Pertambangan dan Penggalian	1,454	34,116
Industri manufaktur	15,708	118,883
Listrik, Gas dan air	1,273	1,388
Konstruksi	17,447	39,110
Jasa	**219,786**	**238,941**
Perdagangan grosir, perdagangan eceran, restoran dan hotel	79,040	70,120
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	33,302	58,656
Keuangan, Asuransi, Properti dan Layanan usaha	8,362	4,502
Jasa sosial dan pribadi	99,082	105,663
Semua industri	**285,621**	**1,875,112**

Sumber: BPS, 2009a.

Tabel 7: Pekerja berdasarkan status pekerjaan yang utama, 2009

	Pengusaha	Pekerja berupah	Wirausaha	Total
Laki-laki	26,427	251,181	974,270	1,251,878
Perempuan	4,192	105,014	799,649	908,855
Laki-laki dan perempuan	30,619	356,195	1,773,919	2,160,733
Perkotaan	11,665	154,349	119,607	285,621
Pedesaan	18,954	201,846	1,654,312	1,875,112

Sumber: BPS, 2009a.

Tabel 8: Penduduk usia 15+ tahun yang bekerja minggu lalu dalam kegiatan informal berdasarkan Jenis kelamin dan latar belakang pendidikan, 2008

Informal	Tidak lulus SD	SD	SMP	SMA	Pendidikan tinggi	Total
Laki-laki	285,995	454,900	122,838	83,906	4,232	951,871
Perempuan	231,335	384,703	79,138	39,571	2,863	737,610
Laki-laki & perempuan	517,330	839,603	201,976	123,477	7,095	1,689,481
Pedesaan	500,893	806,196	181,072	94,765	5,352	1,588,278
Perkotaan	16,437	33,407	20,904	28,712	1,743	101,203

Jumlah yang bekerja	Tidak lulus SD	SD	SMP	SMA	Pendidikan tinggi	Total
Laki-laki	312,624	520,426	157,006	174,474	45,812	1,210,342
Perempuan	251,546	413,846	92,110	87,443	30,818	875,763
Laki-laki & perempuan	564,170	934,272	249,116	261,917	76,630	2,086,105
Pedesaan	536,929	871,939	205,834	162,468	38,176	1,815,346
Perkotaan	27,241	62,333	43,282	99,449	38,454	270,759

Sumber: BPS, 2009a.

Tabel 9: Perkembangan pekerjaan, 2002-2008

NTT	2002	2006	2008
Pertanian, Kehutanan, Berburu dan Perikanan	**1,355,186**	**1,470,101**	**1,448,074**
Industri	**212,062**	**211,707**	**209,565**
Pertambangan dan Penggalian	14,620	3,348	18,544
Industri manufaktur	155,161	164,428	140,866
Listrik, Gas dan air		1,228	2,626
Konstruksi	42,281	42,703	47,529
Jasa	**285,618**	**291,379**	**428,466**
Perdagangan grosir, perdagangan eceran, restoran dan hotel	110,718	93,527	141,387
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	33,460	61,463	97,102
Keuangan, Asuransi, Properti dan Layanan usaha	13,885	5,719	10,059
Jasa sosial dan pribadi	127,555	130,670	179,918
Semua industri	**1,852,866**	**1,973,187**	**2,086,105**

Sumber: BPS (2008a., 2006, 2002)

Tabel 10: PDBR di NTT berdasarkan harga pasar konstan yang berlaku tahun 2000 menurut asal industri, 2004-2008 (Milyar Rupiah)

NTT	2004	2006	2008**
Pertanian, Kehutanan, Berburu dan Perikanan	**3,994**	**4,233**	**4,529**
Industri	**982**	**1,029**	**1,089**
Pertambangan dan Penggalian	131	138	149
Industri manufaktur	154	166	172
Listrik, Gas dan air	38	41	44
Konstruksi	659	684	724
Jasa	**4,561**	**5,107**	**5,809**
Perdagangan grosir, perdagangan eceran, restoran dan hotel	1,524	1,695	1,876
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	628	719	835
Keuangan, Asuransi, Properti dan Layanan usaha	281	315	403
Jasa sosial dan pribadi	2,128	2,378	2,695
Semua industri	**9,537**	**10,369**	**11,426**

Sumber: BPS, 2009e.

Keterangan: Angka tahun 2008 bersifat sangat provisional

Tabel 11: Rata-rata jam kerja per minggu dan rata-rata upah /gaji/penghasilan per bulan pekerja * berdasarkan industri utama (2008)

	Pertanian, Kehutanan, Berburu & Perikanan		Pertambangan & Penggalian		Industri manufaktur		Listrik, Gas dan air		Konstruksi	
	Jam kerja	Upah	Jam kerja	Upah	Jam kerja	Upah	Jam kerja	Upah	Jam kerja	Upah
Laki-laki	41	424,801	35	327,225	44	772,847	45	1,566,982	46	705,293
Perempuan	30	198,181	26	495,039	41	502,700	40	550,000	41	1,079,099
Total	**38**	**357,317**	**31**	**392,569**	**43**	**725,096**	**45**	**1,509,300**	**46**	**714,309**
	Perdagangan grosir, perdagangan eceran, restoran dan hotel		**Transportasi, penyimpanan dan komunikasi**		**Keuangan, Asuransi, Rel estat dan Layanan usaha**		**Layanan masyarakat, Jasa sosial dan pribadi**		**Total**	
	Jam kerja	Upah	Jam kerja	Upah	Jam kerja	Upah	Jam kerja	Upah	Jam kerja	Upah
Laki-laki	52	442,188	49	636,329	46	1,392,833	40	1,670,932	43	1,100,578
Perempuan	60	669,572	41	738,508	41	1,475,849	42	1,320,845	42	1,076,405
Total	**55**	**607,877**	**49**	**642,149**	**45**	**1,416,049**	**40**	**1,528,292**	**43**	**1,093,109**

Sumber: BPS, 2008b.

Tabel 12: Rata-rata jam kerja per minggu dan rata-rata upah/gaji/penghasilan per bulan pekerja *berdasarkan industri utama (2008)

	Pertanian, Kehutanan, Berburu & Perikanan		Pertambangan & Penggalian		Industri manufaktur		Listrik, Gas dan air		Konstruksi	
	Jam kerja	Upah	Jam kerja	Upah	Jam kerja	Upah	Jam kerja	Upah	Jam kerja	Upah
NTT	38	357,317	31	392,569	43	725,096	45	1,509.300	46	714,309
Indonesia	37	546,739	45	1,751,750	46	868,886	44	1,829,703	47	899,440
	Perdagangan grosir, perdagangan eceran, restoran dan hotel		**Transportasi, penyimpanan dan komunikasi**		**Keuangan, Asuransi, Rel estat dan Layanan usaha**		**Layanan masyarakat, Jasa sosial dan pribadi**		**Total**	
	Jam kerja	Upah	Jam kerja	Upah	Jam kerja	Upah	Jam kerja	Upah	Jam kerja	Upah
NTT	55	607,877	49	642,149	45	1,416,049	40	1,528,292	43	1,093,109
Indonesia	51	951,664	49	1,231,933	44	1,723,636	42	1,274,795	43	976,923

Tabel 13: Rata-rata jam kerja per minggu dan rata-rata upah/gaji/penghasilan per bulan pekerja * berdasarkan industri utama (2008)

	Kurang dari primary		SD		SMP		SMA		Pendidikan tinggi		Total	
	Jam kerja	Upah	Jam kerja	Upah	Jam kerja	Upah	Jam kerja	Upah	Jam kerja	Upah	Jam kerja	Upah
Laki-laki	44	434,172	46	548,265	46	812,857	42	1,461,290	38	2,023,238	43	1,100,578
Perempuan	36	320,006	45	337,871	57	503,151	41	1,334,567	36	1,634,607	42	1,076,405
Total	**42**	**406,029**	**46**	**498,636**	**48**	**749,773**	**42**	**1,419,847**	**37**	**1,850,991**	**43**	**1,093,109**

Sumber: BPS, 2008b.

Keterangan: buruh termasuk pekerja, pekerja harian di sektor pertanian dan pekerja harian non pertanian